

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DESA PERIODE 2008-2013  
(Studi pada Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

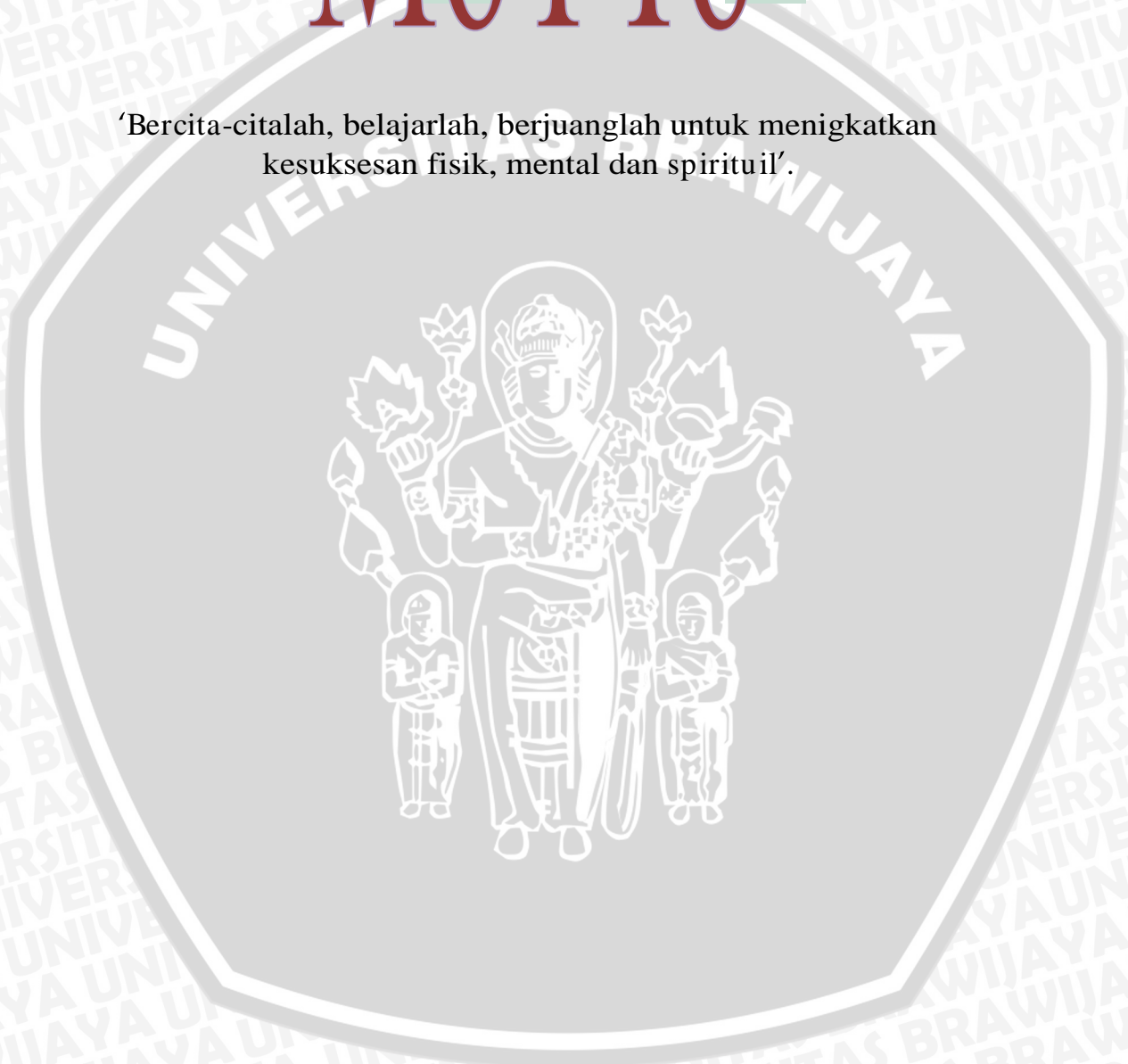
**Wahyuli Asih  
NIM 0510313142**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH  
MALANG  
2009**

# MOTTO

'Bercita-citalah, belajarlah, berjuanglah untuk meningkatkan kesuksesan fisik, mental dan spirituil'.



## RINGKASAN

Wahyuli Asih, 2009, Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilihan Kepala Desa Periode 2008-2013 (Studi pada masyarakat desa sumberbrantas, kecamatan bumiaji, Kota batu), Ketua Komisi Pembimbing: Drs. Bambang Santoso Haryono, MS, anggota komisi Drs. Dwi Sulisty, MPA.

---

Partisipasi Politik Masyarakat merupakan faktor penting dalam sebuah negara demokrasi. Negara Indonesia merupakan suatu negara demokrasi dimana demokrasi yang dianut dan dikembangkan adalah demokrasi pancasila pula, yang mana sistem politik ini menuntut adanya partisipasi politik masyarakat. Salah satu sarana Partisipasi Politik adalah melalui pemilihan umum. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 perubahan besar pada supra-struktur politik ketenegaraan Indonesia yakni perubahan ketentuan pemilihan presiden dan wakil presiden dari sistem perwakilan menjadi pemilihan secara langsung. Bagi perkembangan politik lokal, perubahan juga merupakan peluang untuk mendorong pemilihan penguasa lokal tak terkecuali pemilihan ditingkat paling rendah pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung.

Tujuan penelitian ini adalah 1). untuk mengetahui dan menganalisa bentuk dan sifat Partisipasi Politik masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa di Desa Sumberbrantas periode 2008-2013; 2). Untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa di Desa Sumberbrantas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan sifat Partisipasi Politik masyarakat Desa Sumberbrantas dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi Partisipasi Politik masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa di Desa Sumberbrantas. Fokus penelitian pertama bentuk dan sifat partisipasi politik masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena yang terjadi, menganalisa serta membuat suatu masalah yang dipecahkan. Lokasi penelitian di Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Sumberbrantas tergolong tinggi baik dalam bentuk kampanye, pemungutan suara ataupun perhitungan suara masyarakat lebih bersifat otonom atas kesadaran sendiri dan tidak ada yang dimobilisasi (paksaan orang lain). Ini karena Desa Sumberbrantas merupakan Desa yang baru didirikan tahun 2006 berpisah dari Desa Tulung Rejo dan pelaksanaan Pilkades baru pertama kali ini dilaksanakan.

Saran yang direkomendasikan yaitu: 1). Jika Pilkades mengarah pada persaingan yang tidak sehat, maka untuk mengantisipasi pemerintah desa membentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan memberikan pemahaman demokrasi yang baik.



## ABSTRACT

Wahyuli Asih, 2009, Society's Political Participation in Village Head Election for the Period of 2008-2013 (A study on Society of Sumberbrantas Village, Bumiaji District, Batu City), Supervisor : Drs. Bambang Santoso Haryono, MS, Co Supervisor : Drs. Dwi Sulisty, MPA. 88 Pages + xiii

---

Society's political participation is a significant factor in a democratic country. Indonesia is a democratic country following and developing Democracy which demands a political participation from its society. One of ways to meet such requirement is by having general election. The amendment of 1945 Constitution; a major change in political supra-structure of Indonesia's state administration is a change in law/regulation of president and vice president election from representative system into direct election. For local political development, the amendment is also an opportunity to stimulate direct election of local government including one on the lowest governmental level i.e. head village election.

The purposes of this research are: 1) to identify and analyze the form and characteristic of village society's political participation in head village election at Sumberbrantas village for period of 2008-2013; 2) to identify and analyze factors influencing village society's political participation in head village election at Sumberbrantas village. Problem formulations of the research are: how is the form and characteristic of Sumberbrantas village society's political participation in implementing head village election, and what are the factors influencing village society's political participation in head village election at Sumberbrantas village. The research focuses on whether the characteristic of society's participation based on self awareness (autonomy) or other people's pressure (mobilization).

This research applied in survey method using descriptive research with qualitative approach to illustrate any phenomenon occurred, analyze, and solve problems. This research was located at Sumberbrantas village, Bumiaji district, Batu city.

The results showed that the level of Sumberbrantas village society's political participation was high, both in the form of campaign, voting, and voting result's calculation; the participation was more likely self awareness (autonomy) and nobody was mobilized (no pressure from others). This is because Sumberbrantas village was established on 2006 after separated from Tulungrejo village; and also this was the village's first election.

The suggestion are: if the head village election was under unfair competition, village administration should anticipate it by forming a non-governmental organization and giving better understanding on a good democracy.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamua'alaikum Warahmaatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Politik Masyarakat desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Periode 2008-2013 (Studi Pada Masyarakat Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)”**, yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhamamad SAW yang membawa kita dari kebodohan pada cahaya iman, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu tak lupa penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kakek nenek, ayah ibu tercinta yang telah membesarkan, membimbing serta dorongannya.
2. Drs. Bambang Santoso Haryono, MS dan Drs. Dwi Sulisty, MPA selaku komisi pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik dan Dr. MR. khairul muluk, MS selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik yang telah membantu secara administratif dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh masyarakat desa Sumberbrantas yang telah menerima dan membantu selama penelitian berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberikan segenap ilmunya.
6. Bos kentang, adik-adik dan keluarga yang selalui menyayangi dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

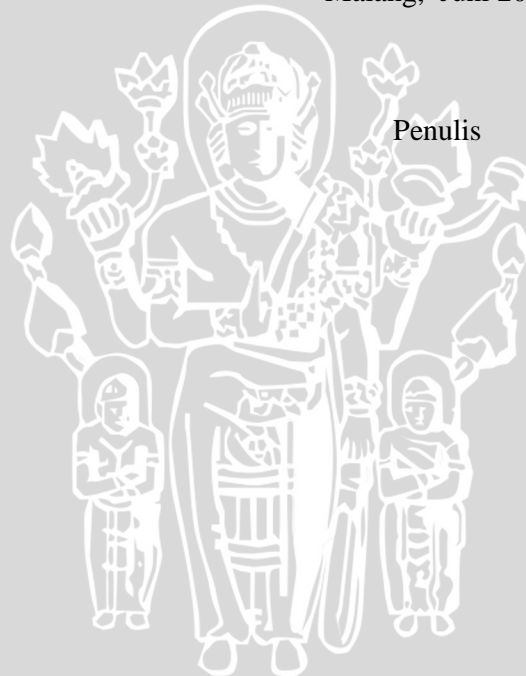
7. Seluruh teman FIA PUBLIK angkatan 2005 khususnya kelas F yang telah membarikan semangat dan bantuan dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dengan senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan khususnya bagi penulis, bagi instansi terkait, dan Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, serta pembaca pada umumnya sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan laporan ini.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, Juni 2009

Penulis





## DAFTAR ISI

MOTTO	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN.....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kontribusi Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Demokrasi.....	11
1. Pengertian.....	11
2. Prinsip-prinsip Demokrasi .....	14
3. Nilai-nilai Demokrasi.....	17
4. Model Demokrasi.....	18
5. Barometer Demokrasi .....	19
B. Pemilihan Umum .....	20
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum .....	20
2. Sistem Pemilihan Umum .....	21
3. Asas Pemilihan Umum.....	22
4. Pilihan Kepala Desa .....	23
C. Partisipasi Politik .....	26
1. Pengertian.....	26
2. Fungsi Partisipasi Politik .....	30
3. Bentuk Partisipasi Politik.....	31
4. Sifat Partisipasi Politik.....	34
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.....	35
D. Hubungan Partisipasi Politik dengan Pilihan Kepala Desa .....	39

<b>BAB III METODOLOGI .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Fokus Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Instrument Penelitian.....	45
G. Analisa Data .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Penyajian Data.....	47
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
a. Keadaan Geografis .....	47
b. Keadaan Penduduk .....	49
c. Keadaan Perekonomian .....	50
d. Keadaan Sosial Budaya .....	51
e. Keadaan Sosial Politik .....	54
2. Gambaran Umum Situs Penelitian .....	58
a. Panitia Pemilihan Kepala Desa .....	58
b. Desa Sumberbrantas .....	60
3. Gambaran Umum Responden.....	62
4. Penyajian Data Fokus Penelitian .....	64
a. Sifat Dan Bentuk Partisipasi Politik.....	64
b. Faktor-Faktor yang Mendorong Partisipasi Politik .....	72
B. Analisis Dan Pembahasan.....	77
1. Bentuk Dan Sifat Partisipasi Politik .....	77
2. Faktor-Faktor yang Mendorong Partisipasi Politik .....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1	Jumlah Penduduk Desa Sumberbrantas Tahun 2008 Menurut Klasifikasi Umur	49
2	Jumlah Prasarana Bidang Pendidikan Desa Sumberbrantas	52
3	Jumlah Penduduk Desa Sumberbrantas Tahun 2008 berdasarkan agama	53
4	Jumlah Sarana Ibadah Desa Sumberbrantas Tahun 2008	54
5	Rekapitulasi Hak Pilih Desa sumberbrantas 2008	61
6	Karakteristik Responden berdasarkan usia	62
7	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis kelamin	62
8	Karakteristik Responden berdasarkan tingkat Pendidikan	63
9	Karakteristik Responden berdasarkan tingkat pekerjaan	63
10	Tingkat kehadiran masyarakat dalam kampanye tahun 2008 desa sumberbrantas	66
11	Sifat Partisipasi Politik masyarakat dalam kegiatan kampanye tahun 2008 desa sumberbrantas	67
12	Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkades Periode 2008-2013 Di Desa Sumberbrantas	69
13	Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara Pilkades di setiap Perdukuan Di Desa Sumberbrantas	70
14	Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara Tahun 2008 Di Desa Sumberbrantas	71
15	Sifat Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara Tahun 2008 Di Desa Sumberbrantas	71
16	Partisipasi politik masyarakat dalam Penghitungan Suara Tahun 2008 Di Sumberbrantas 2008	73
17	Sifat Partisipasi politik masyarakat dalam Penghitungan Suara Tahun 2008 Di Sumberbrantas 2008	73
18	Mayoritas Penghasilan Masyarakat Desa Sumberbrantas 2008	75
19	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sumberbrantas 2008	77

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1	Teknik pelaksanaan Pilihan Kepala Desa	41
2	Peta Wilayah Desa Sumberbrantas	50
3	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	54
4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	55
5	Struktur organisasi pemerintah desa dengan pola 5 kepala urusan	
7	Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberbrantas Periode 2008- 2013	62
8	Struktur Organisasi Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberbrantas Periode 2008-2013	63



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
1	Surat Keterangan pelaksanaan Survey
2	Surat Keterangan selesi Survey
3	Daftar pertanyaan / Kuisisioner
4	Pedoman Wawancara
5	Tata tertib pemilihan kepala desa Sumberbrantas
6	Dokumentasi Penelitian Mengenai Pemilihan kepala desa Sumberbrantas Periode 2008-2013
7	Curriculum Vitae





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah mencakup keseluruhan segi kehidupan bangsa Indonesia, dan memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Sedangkan hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian keseluruhan kegiatan pembangunan tersebut, harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan tidak akan berhasil tanpa adanya peran aktif masyarakat. Negara Indonesia merupakan suatu negara demokrasi dimana demokrasi yang dianut dan dikembangkan adalah demokrasi dengan sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi, yang mana sistem politik ini menuntut adanya partisipasi politik masyarakat. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Alfian (1980):

“Hakekat sistem politik demokrasi adalah pengakuan terhadap kekuasaan yang berada atau bersumber pada rakyat, maka sistem politik itu hanya mungkin berjalan bilamana rakyat itu sendiri berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab atau ikut didalamnya”.

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan kita sudah tidak menggunakan sistem sentralistik yang lebih berpusat pada satu kekuasaan pemerintah pusat, akan tetapi dengan perubahan waktu Indonesia sudah menggunakan sistem desentralisasi dimana pemerintah pusat memberi kuasa kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan dikeluarkannya UU No 22/1999 memberi kontribusi dalam pengembangan desentralisasi, yang kemudian diamandemen menjadi UU No 32/2004 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 (5) UU NOMOR 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 (6) UU NOMOR 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Otonomi daerah membawa dampak yang sangat luas terhadap perkembangannya Demokrasi di Indonesia serta membawa harapan besar untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran daerah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Rakyat bisa menentukan pilihannya sendiri dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini membawa perubahan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan, karena calon yang akan memimpin dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini membuktikan adanya sikap demokratis dan ketransparanan bagi rakyat yang akan memilih seorang pemimpin secara terbuka tidak memilih bagaikan kucing dalam karung. Bagaimanapun ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1947 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah.

Dengan adanya Otonomi daerah, membuka peluang terbukanya saluran-saluran politik masyarakat yang selama ini dihilangkan. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai makna pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, politik (sistem pengambilan keputusan) dan sosial (kelembagaan masyarakat) hingga pada tingkat desa, serta aspek lingkungan (*sustainability*). Pemerintah desa sebagai pemerintah tingkat penyelenggaraan yang paling rendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat berkaitan dengan pemerintah harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat, guna kelancaran pelaksanaan



pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang semakin luas dan kompleks.

Pengaturan mengenai desa mengalami perubahan seiring dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini secara nyata mengakui otonomi desa. Otonomi yang dimiliki oleh desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Sehingga yang disebut Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Dengan demikian, otonomi yang dimiliki desa adalah Otonomi Asli, yaitu otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat. Sehingga dalam kenyataannya pasti akan timbul berbagai keanekaragaman, baik dari segi nama, susunan pemerintahan, maupun bentuk-bentukan geografisnya. Tegasnya, terdapat keadaan-keadaan khusus yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari sinilah sebenarnya prinsip-prinsip "Kebhinekaan" itu ada dan berkembang secara nyata dalam masyarakat. Sehingga secara riil hak-hak, asal-usul, dan istiadat dihormati sebagai modal pembangunan desa.

Kepala desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah desa, urusan pemerintah daerah, urusan pemerintah umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong sebagai sendi utama dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan desa, maka pada tingkat desa dilaksanakan pemilihan kepala desa secara langsung oleh warganya, ketentuan tentang pemilihan ini dimuat dalam Pasal 203 ayat 1 Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan: "Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata



cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah”.

Dengan memahami penegasan diatas kiranya jelaslah bahwa rangka terjaminnya eksistensi sistem demokrasi pancasila mutlak diperlukan adanya partisipasi politik masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Miriam Budiarjo (1982) bahwa:

Di negara-negara demokrasi pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya, jadi partisipasi politik merupakan suatu pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat.

Pemilihan penguasa dinegara demokrasi pada umumnya dilakukan melalui pemilihan umum, yang merupakan salah satu sarana partisipasi politik masyarakat, dimana melalui pemilihan umum rakyat secara langsung atau tidak langsung memilih orang-orang yang akan memegang jabatan-jabatan politis. Disamping pemahaman tersebut hubungannya dengan ilmu adminisyrasi negara yang menjelaskan adanya suatu proses kerjasama antar individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok untuk mnencapai tujuan negara. Kerjasama ini melibatkan beberapa unsur yang ada baik itu dari aparat pemerintah maupun unsur-unsur dari masyarakat. Keterlibatan ini mendorong adanya suatu upaya dari aparat pemerintah yang dipilih oleh rakyat untuk dapat menyalurkan aspirasi yang berkembang dimasyarakat karena pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi-aspirasi tersebut karena percaya oleh rakyat untuk memimpin mereka.

Disamping itu pembangunan di Indonesia juga menggunakan pendekatan dari atas (*Top Down Strategy*) dan dari bawah (*bottom up strategy*) dengan melihat kekuatan dan kelemahan kedua pendekatan tersebut, maka dalam program pengembangan masyarakat, pendekatan dari bawah (dilengkapi dengan bimbingan dari atas), merupakan alternatif yang layak digunakan. (Saut P. Silaban: 2005)

Dengan pendekatan tersebut, partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting bahkan mutlak diperlukan. Karena pendekatan tersebut bertumpu pada kekuatan masyarakat untuk secara aktif berperan serta (ikut serta) dalam

proses pembangunan secara menyeluruh. Partisipasi saja sebagai strategi dalam program pengembangan masyarakat, tetapi ia juga menjadi hasil yang sangat diharapkan dari pada program pengembangan masyarakat. Pentingnya partisipasi antara lain:

- a. Dapat merangsang timbulnya swadaya masyarakat, yang merupakan dukungan penting bagi pembangunan.
- b. Dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan masyarakat dalam membangun.
- c. Pelaksanaan pembangunan, semakin sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- d. Jangkauan pembangunan menjadi lebih luas, meskipun dengan dana yang terbatas.
- e. Tidak menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh karena Partisipasi Politik Masyarakat masih sangat perlu dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu diupayakan pembinaan dan pendidikan politik bagi masyarakat agar partisipasi politik masyarakat dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Sebab dalam Negara yang menganut paham demokrasi, apabila partisipasi masyarakat telah cukup tinggi berarti masyarakatnya telah menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara dan sekaligus juga merupakan adanya suatu pengakuan tentang kedaulatan yang berada ditangan rakyat.

Untuk tercapainya partisipasi masyarakat dengan baik, perlu kiranya peranan pemerintah dalam mengusahakannya, sebab tanpa adanya pembinaan dan pendidikan tentu partisipasi politik masyarakat tidak akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, apalagi dalam pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini sangat perlu peran aktif seluruh masyarakat atau pemerintah demi kelancaran pemerintahan.

Dalam Negara yang menganut paham demokrasi, partisipasi politik masyarakat dapat dikatakan tinggi apabila masyarakat telah menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara dan sekaligus juga merupakan adanya suatu pengakuan tentang kedaulatan yang berada ditangan rakyat. Demikian pula yang dilaksanakan di Indonesia, pada tingkat dan lingkup nasional, pemilihan



umum diselenggarakan untuk memilih anggota-anggotanya DPR, DPRD, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dewan perwakilan daerah (DPD).

Sedangkan pada tingkat dan lingkup desa dilaksanakan pemilihan kepala desa yang mana dalam proses pemilihan kepala desa diperlukan adanya partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat tersebut dimaksudkan disamping sebagai konsekuensi sebagai suatu negara dengan sistem demokrasi tetapi juga diharapkan agar proses pemilihan kepala desa berjalan lancar dan lebih penting agar terciptanya suatu pemberian legitimasi yang mantap bagi sistem politik desa dan juga pembaharuan desa.

Pilkades merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam membangun demokrasi pada tingkatan yang paling rendah. Idealisasi yang diharapkan tentu guna membangun kemandirian desa dalam konteks otonomi. Secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat, serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar. Desa juga telah lama eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum atau *self governing community* yang memiliki sistem pemerintahan lokal berdasarkan pranata lokal yang unik dan beragam. (Achmad Maulani, 2008)

Maka dari hal tersebut pembaharuan desa mendapat perbaikan kehidupan desa. Pembaharuan desa dilakukan untuk mengawal perubahan relasi ekonomi politik desa secara internal maupun eksternal yang memiliki tatanan kehidupan baru yang demokratis, mandiri dan adil. Dengan demikian, pembaharuan desa merubah ketimpangan ekonomi politik desa maupun krisis sosial di desa. Pembaharuan desa juga dapat mendorong masyarakat belajar secara kritis untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di desa.

Salah satunya bentuk Partisipasi masyarakat desa dapat disalurkan melalui pemilihan kepala desa sebagai salah satu bentuk perwujudan pesta demokrasi. Masyarakat desa memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan pembaharuan desa dengan dipilihnya kepala desa baru yang memiliki legitimasi yang kuat dan berdaulat. Kepala desa tersebut juga diharapkan akan dapat menggerakkan dan



meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan dan pembaharuan desanya.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) periode 2008-2013 di desa Sumberbrantas dilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 April 2008 berlangsung Aman, lancar dan tertib. Hampir dua ribu warga masyarakat di tiga dusun se Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji, Kota Batu yang mengikuti pesta demokrasi pemilihan kepala desa, yang baru kali pertama digelar di Desa termuda di Kota Batu ini diadakan di balai pertemuan warga, untuk bisa menjadi kepala desa selama enam tahun kedepan. Ke lima kandidat kepala desa yang maju dalam pemilihan Kepala Desa Sumberbrantas ini adalah Prawito dari Dusun Jurang Kual, Suliono dari Dusun Lemah Putih, Sujianto dari Dusun Krajan, Drs.Parwito Sugeng dari Dusun Jurang Kual, dan Hadi Supikto dari Dusun Krajan.

Pemilihan kepala desa ini merupakan yang pertama digelar di Desa Sumberbrantas setelah menjadi desa mandiri dan tak lagi bergabung dengan Desa Tulungrejo sejak 2006 lalu. Walaupun baru pertama kali melaksanakan Pilkades sendiri tetapi tingkat partisipasi masyarakat f dapat dikatakan tinggi hal ini terbukti dari kedatangan masyarakat dalam mengikuti Pilkades sebesar 90.78% yang menggunakan hak suaranya. Apapun yang melatarbelakanginya masyarakat sangat antusias dalam pemilihan kepala desa apalagi hal in baru pertama kali diadakan di desa Sumberbrantas baik dikarenakan akan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari calon kepala desa ataupun pendukung para calon ataupun dikarenakan oleh adanya pemberian uang oleh pendukung calon kepala desa suara mendapatkan suara yang lebih banyak.

Pemberian hak suara dalam pilihan kepala desa tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang dilakukan oleh mayarakat desa Sumberbrantas, akan tetapi bentuk partisipasi politik masyarakat tidak hanya hal tersebut saja, tapi lebih mendalam pada bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat. Yang mana masyarakat tersebut harus ikut ambil bagian dari setiap hal yang dilakukan dalam proses Pilkades seperti kegiatan kampanye, pemungutan suara, sampai dengan penghitungan suara.

Bertitik tolak pada uraian diatas, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil judul **“Partisipasi**

**Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaa Pemilihan Kepala Desa (Studi pada mayarakat desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)”**

**B. Perumusan Masalah**

Partisipasi Politik Masyarakat Desa dalam Pemilihan Kepala Desa menjadi salah satu bagian dari awal dari proses demokrasi yang dikembangkan di Indonesia, sehingga diharapkan tadanya seorang figur kepala desa yang dapat memimpin dan mengayomi masyarakat serta dapat menjalankan program-programnya yang sesuai dengan wewenang dan kewajibanya.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk dan sifat Partisipasi Politik masyarakat Desa Sumberbrantas dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa?
2. Apakah faktor-faktor yang dapat mendorong Partisipasi Politik masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa di Desa Sumberbrantas?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan Rumusan Msalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk dan sifat Partisipasi Politik masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa di Desa Sumberbrantas.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mendorong Partisipasi Politik masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa di Desa Sumberbrantas.

**D. Kontribusi Penelitian**

1. Secara teoritik  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi peningkatan ilmu pengetahuan, khususnya kosentrasi pemerintah daerah tentang Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi peneliti penelitian ini sebagai sarana pembelajaran untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh serta

sebagai sarana pengembangan Ilmu Administrasi Pemerintahan Daerah dan juga menambah pengetahuan atas permasalahan yang muncul dalam Partisipasi Politik masyarakat serta memberikan alternatif dan solusi.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan informasi kepada Tim Fasilitas dan pengawas pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumber Brantas dalam upaya perbaikan terhadap kekurangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dan dapat dijadikan penyempurna pelaksanaan pemilihan kepala desa pada periode berikutnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana pendidikan politik kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Sumber Brantas sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi politik dalam rangka mewujudkan otonomi daerah.

## **E. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang dilakukangya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematis pembahasan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini memuat tentang teori-teori yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Teori-teori yang digunakan antara lain: teori tentang partisipasi politik yang meliputi pengertian, sifat, bentuk, fungsi serta factor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam Bab ini membahas tentang jenis, focus, lokasi dan situs penelitian kemudian dilanjutkan dengan sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta instrument penelitian dan diakhiri dengan analisa data penelitian.



**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan gambaran umum lokasi dan situs yang dijadikan obyek penelitian kemudian dilanjutkan dengan penyajian data yang meliputi sifat partisipasi yang otonom dan yang mobilitas dalam kegiatan kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara serta demonstrasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat. Dan diakhiri dengan analisa dan pembahasan mengenai berbagai masalah yang ada.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. DEMOKRASI

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (andependent) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses PEMILU Ilegislatif, selain sesuai hukum dan peraturan Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat.

### 1. Pengertian

Menurut Jeff Hayness (2000) *dalam* Masad Masrur (2008) membagi pemberlakuan demokrasi ke dalam tiga model berdasarkan penerapannya. Ketiganya yaitu demokrasi formal, demokrasi permukaan dan demokrasi substantif. Ketiga model ini menggambarkan praktik demokrasi sesungguhnya yang berlangsung di negara manapun yang mempraktikkan demokrasi di atas bumi ini.

- a. Demokrasi formal ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan interval yang teratur dan ada aturan yang mengatur pemilu. Peran pemerintah adalah mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya.
- b. Demokrasi permukaan merupakan gejala yang umum di Dunia Ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Pemilu diadakan sekadar *para os ingleses ver*, artinya "supaya dilihat oleh orang Inggris". Hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas rendah yang dalam banyak hal tidak jauh dari sekadar polesan pernis demokrasi yang melapisi struktur politik.
- c. Demokrasi substantif menempati ranking paling tinggi dalam penerapan demokrasi. Demokrasi substantif memberi tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di suatu negara. Dengan kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekadar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata.

Winston Churchill *dalam* Masad Masrur (2008), Perdana Menteri Inggris, "It has been said that democracy is the worst form of government except all the



*others that have been tried*". Demokrasi bukan sistem pemerintahan terbaik, tetapi belum ada sistem lain yang lebih baik daripadanya. Negara, biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem demokrasi modern. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Sebab demokrasi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi berkembang menjadi sebuah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti Indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah merobah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.

Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut (eksekutif, yudikatif dan legislatif) adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk

mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih). Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi.

## **2. Prinsip-prinsip demokrasi**

Pelaksanaan demokrasi haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

### **1. Pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab.**

Pemerintah yang terbuka adalah pemerintahan yang bersedia menyebarkan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat luas, sedangkan yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah pemerintah dalam hal ini dalam melaksanakan roda pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat

### **2. Dewan Perwakilan rakyat yang representatif**

Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil rakyat maka dalam bertindak harus bisa secara representatif, artinya benar-benar mewakili rakyat yang telah memilihnya



### 3. Badan Kehakiman atau peradilan yang bebas dan merdeka

Badan Kehakiman atau peradilan merupakan lembaga yang menegakkan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu adanya supremasi hukum dalam segala bidang. Hukum ditegakkan dan wajib ditaati oleh semua warga negara termasuk pemerintah. Agar hukum tegak dan kuat maka lembaga peradilan dan kehakiman harus bersifat independen, bebas, dan merdeka dari pengaruh lembaga lain.

### 4. Pers yang bebas

Pers yang bebas sering dikatakan sebagai pilar keempat dari demokrasi. Lembaga pers merupakan cerminan dari adanya kebebasan berpendapat para warga negara. Pers dapat menciptakan iklim keterbukaan, sarana pendidikan, dan media partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara

### 5. Prinsip Negara hukum

Negara hukum berarti negara terikat pada hukum, namun demikian bukan berarti negara hukum sama dengan negara demokrasi. Negara hukum tidak mesti demokratis. Prinsip negara hukum adalah salah satu ciri negara demokrasi. Ciri negara hukum antara lain:

- a. Adanya jaminan Hak asasi manusia
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
- c. Badan negara menjalankan kekuasaan berdasarkan atas hukum
- d. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga sesuai dengan UUD
- e. Putusan Pengadilan dilaksanakan oleh badan yang berwenang

### 6. Sistem Dwi Partai atau Multipartai

Negara demokrasi menghargai tumbuhnya partai politik sebagai sarana penampung aspirasi rakyat. Partai tunggal dianggap tidak demokratis karena tidak dapat menampung berbagai aspirasi masyarakat

### 7. Pemilihan Umum yang demokratis

Pemilu adalah sebagai lembaga demokrasi, oleh karena itu pemilu harus dijalankan dengan cara yang demokratis pula seperti ciri:

- a. Adanya pengakuan hak memilih dan dipilih



- b. Adanya keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan aspirasi rakyat
  - c. Adanya kebebasan memilih untuk menentukan pilihannya
  - d. Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon wakil rakyat yang demokratis
  - e. Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk bersaing secara sehat
  - f. Ada pemantau independen
  - g. Penghitungan suara yang jujur
  - h. Aparat birokrat yang independen
8. Adanya jaminan hak asasi manusia

Seperti hak berkumpul, mengeluarkan pendapat, berserikat dan kebebasan pers. (<http://edupkn.smansarbg.com/asaspemilu.html>)

Sedangkan menurut Inu Kencana *dalam* Hasyim (1980) prinsip partisipasi politik terdiri dari yaitu:

1. Adanya pembagian kekuasaan ( *sharing of power* )
2. Adanya pemilihan umum yang bebas ( *general election* )
3. Adanya manajemen pemerintahan yang terbuka
4. Adanya kebebasan individu
5. Adanya peradilan yang bebas
6. Adanya pengakuan hak minoritas ( adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas, mesti ada pengakuan baik terhadap agama yang minoritas penganutnya atau terhadap golongan ekonomi lemah sepereto pedagang kaki lima)
7. Adanya pemerintah yang berdasarkan hukum
8. Adanyapers yang bebas
9. Adanya multi partai ( supaya tidak menimbulkan kediktator partai atau sistem monolitik partai politik, sistem demokrasi memberikan ruang tumbuhnyamulti partai politik yang bebas dalam mengemukakan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat untuk disampaikan kepada negara atau pemerintahan)
10. Adanya musyawarah
11. Adanya persetujuan parlemen

12. Adanya pemerintah yang konstitusional
13. Adanya ketentuan pendukung tentang sistem demokrasi
14. Adanya pengawasan terhadap administrasi publik
15. Adanya perlindungan hak asasi manusia
16. Adanya pemerintahan yang bersih (*clean and good government*)
17. Adanya persaingan keahlian (*professionalism*)
18. Adanya mekanisme politik
19. Adanya kebijakan negara yang berkeadilan
20. Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab.

Prinsip demokrasi yang relevan dengan pemilihan kepala desa Sumber Brantas terdapat pada point 2) pemilihan umum yang bebas (*general election*), 4) Adanya kebebasan individu, 6) pengakuan hak minoritas 10) Adanya musyawarah, 18) Adanya mekanisme politik. Artinya pemilihan kepala desa dapat dikatakan pemilihan umum tingkat desa yang memegang teguh kepada kebebasan individu untuk memilih calon kepala desa, mengakui hak minoritas yang terdapat dalam kehidupan masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan kepala desa, selalu mengadakan musyawarah dalam melakukan kegiatan pemilihan mulai dari pembentukan panitia sampai pertanggungjawaban panitia dalam pemilihan kepala desa) dan pemilihan kepala desa adalah bentuk pergantian kepemimpinan desa atau dengan kata lain sebagai bentuk mekanisme politik yang berlangsung secara damai.

### 3. Nilai-nilai demokrasi

Menurut Henry B. Mayo dalam Hasyim (1980) bahwa demokrasi itu didasari oleh beberapa nilai, yakni:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*).
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur (*orderly succession of rule*).
4. Membatasi kekerasan sampai tingkat minimum (*minimum of coercion*).

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

#### 4. Model demokrasi

Menurut Hasyim (1980) model demokrasi terdiri dari: model demokrasi *liberal-kapitalis* (merupakan bentuk demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai individualisme, kebebasan), demokrasi *sosialis* (lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektifitas), dan demokrasi *pancasila* (bersumber pada nilai-nilai luhur pancasila dan menekankan pada aspek hikmah kebijakan dan musyawarah serta perwakilan).

Sedangkan menurut J. Rolland Pennock *dalam* Hasyim (1980) membagi demokrasi kedalam empat model yaitu: demokrasi individualisme (menekana pada pemberian kebebasan individual), demokrasi utilitarisme (menekankan kepada keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban pada setiap individu dalam menjalankan kehidupan sebagai mahluk sosial dan sebagai warga negara), dan kolektivitas demokrasi (demokrasi menekankan pada kebersamaan dan kekeluargaan dalam berdemokrasi).

Selanjutnya menurut Sklar *dalam* Hasyim (1980) terdapat lima model demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi Liberal  
Yaitu pemerintah yang dibatasi oleh undang-undang dalam pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang pas.
2. Demokrasi Terpimpin  
Yaitu para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat.
3. Demokrasi Sosial  
Yaitu menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarisme bagi masyarakat untuk memperoleh kepercayaan politik.
4. Demokrasi Partisipasi  
Yaitu menekankan pada hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
5. Demokrasi Konstitusional  
Yaitu menekankan pada penegakan aturan dan ketentuan dalam menjalankan demokrasi.



Pemilihan Kepala Desa Sumber Brantas periode 2008-2013 mengatur model Demokrasi Sosial dan Demokrasi Partisipasi, hal ini dibuktikan pada waktu pra pemilihan sampai dengan pasca pemilihan. Masyarakat diberi kepercayaan dan kesempatan untuk ikut berpartisipasi Politik dengan cara menentukan sendiri calon pemimpin yang sesuai dengan hatinya tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain yang berkepentingan, seperti dari calon-calon kepala desa, panitia pemilihan maupun dari tokoh masyarakat. Pemerintah juga mengadakan hubungan timbal balik disini bersifat personal, seperti masyarakat pada waktu pemilihan memilih salah satu calon, kemudian calon yang dipilih memenangkan pemilihan (menjadi kepala desa) maka masyarakat yang memilih kepala desa tersebut akan lebih diprioritaskan daripada masyarakat yang tidak berpihak atau yang tidak memilih.

### 5. Barometer Demokrasi

Kriteria yang dapat menentukan atau menilai suatu negara tersebut demokratis atau tidak demokratis, seperti yang dikemukakan Amien Rais *dalam* Hasyim (1980) adalah sebagai berikut:

1. Adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan
2. Persamaan kedudukan didepan hukum
3. Distribusi pendapatan secara adil
4. Kesempatan memperoleh pendidikan
5. Kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama
6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi
7. Kebebasan individu
8. Semangat kerjasama
9. Hak untuk proses.

Sementara itu Robert A. Dahl *dalam* Hasyim (1980) menyatakan tujuh ciri hakiki yang disebut sebagai negara demokrasi yaitu: penjabat yang dipilih, pemilihan yang bebas dan fair, hak pilih yang cakup semu, hak untuk menjadi calon suatu jabatan, kebebasan pengungkapan diri secara lisan dan tulisan, informasi alternatif, dan kebebasan membentuk asosiasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh W. Ross Yates *dalam* Hasyim (1980) mengajukan enam ciri demokrasi yaitu: Toleransi terhadap orang lain; Perasaan

*fairplay*; Optimisme terhadap hakikat manusia; Persamaan kesempatan; Orang yang terdidik; Jaminan hidup, kebebasan dan milik.

## **B. PEMILIHAN UMUM**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beranekaragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan.

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Dalam rumusan penjelasan undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa yang disebut pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka memwujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945(penjelasan UU No.12 tahun 2000).

### **1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilu**

Landasan Ideal: Pancasila

Landasan Konstitusional: UUD 1945

Landasan Operasional:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik



3. UU RI Nomor 4 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilu
4. UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Disahkan DPR RI tanggal 6 Juli 2003)
5. Keppres RI Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja KPU
6. Keppres RI Nomor 67 Tahun 2002 Tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 16
7. tahun 1999 tentang pembentukan komisi pemilihan umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum komisi pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 81 tahun 2000
8. Keppres RI Nomor 70 tahun 2001 tentang pembentukan komisi pemilihan umum
9. Keppres RI Nomor 81 tahun 2000 tentang pembubaran komisi pemilihan umum sabagaimana diatur dalam keputusan presiden nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan komisi pemilihan umum daan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum komisi pemilihan umum. (Gito, 2008)

## 2. Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam system Pemilihan Umum, akan tetapi menurut Rahman (2007) ilmu politik umunya berkisar pada dua pokok, yaitu:

- a. *Single-Member Constituency* / sistem distrik (satu daerah pemilihan memilih satu wakil). Sistem distrik adalah suatu system pemilihan yang berdasarkan atas kesatuan geografis (kecil tidaknya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat.

Kelemahan: a). kurang memperhitungkan partai-partai kecil dan golongan minoritas; b). kurangnya representative dalam artian bahwa calon yang kalah dalam satu distrik, kehilangan suara-suara yang mendukungnya.



Kelebihan: a). wakil yang terpilih gampang terkenal oleh penduduk, b). lebih mendorong proses integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu; c). Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai untuk mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan meningkatkan tabilitas nasional; dan d). Sistem ini sederhana dan mudah diselenggarakan.

b. *Multi-Member Constituency / proposional representation* / perwakilan berimbang (suatu daerah pemilihan memilih beberapa wakil). Dalam system ini mempunyai gagasan pokok bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya.

Kelemahan: a). system ini mempermudah fregmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru; b). wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat pada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada pemerintah telah memilihnya, karena partai mempunyai peranan yang lebih kuat dibanding kepribadian seseorang; c). banyaknya partai mempersulit terbentuknya pemerintah yang stabil, karena pada umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua partai atau lebih.

Kelebihan: system ini bersifat representative dalam arti bahwa setiap suara turut diperhitungkan dan oraktis tidak ada suara yang hilang.

### 3. Asas Pemilihan Umum

- a. Asas langsung, berarti setiap pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara dan tingkatan
- b. Asas umum, berarti pemilihan itu berlaku menyeluruh bagi semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan, tanpa diskriminasi
- c. Asas bebas, berarti warga negara yang berhak memilih dapat menggunakan haknya, dan dijamin keamanannya melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, dan paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun
- d. Asas rahasia, berarti setiap pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya

- e. Asas Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- f. Asas adil, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. (Gito, 2008)

#### **4. Pilihan Kepala Desa (Pilkades)**

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades sebagai ajang konsolidasi politik di desa memberi pendidikan politik yang mencerdaskan. Warga secara terbuka dihadapkan dengan bakal calon atau calon pemimpinnya. Berbeda dengan pilbup, pilgub, pilpres dan pileg. Pilkades tentu tidak identik dengan memilih kucing dalam karung. karena calon pemimpin yang akan dipilih adalah warga yang secara sosiologis mempunyai kedekatan tersendiri. Semua cela dan celah, baik dan buruk terlihat jelas. Tidak sedikit calon-calon kepala desa yang bertarung dalam percaturan politik tersebut masih mempunyai hubungan kekerabatan. Bahkan kalau dihitung-hitung para pemilih sendiri juga masih merupakan dalam satu lingkup hubungan darah. Meski dengan kalkulasi tingkat kekerabatan yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan genealogis berdirinya desa merupakan berasal dari satu keluarga, kemudian beranak pinang hingga dalam satu wilayah dihuni oleh keluarga dalam jumlah yang banyak. Bercampurnya penduduk pendatang dengan warga asli, menambah dinamisnya interaksi sosial didalamnya.

Pilkades dilakukan dengan mencoblos gambar atau Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan



Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Usia minimal Kepala Desa adalah 25 tahun, dan Kepala Desa haruslah berpendidikan paling rendah SLTP, penduduk desa setempat. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, dimana dibentuk oleh BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Cara pemilihan Kepala Desa dapat bervariasi antara desa satu dengan lainnya. Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.

Pemilihan kepala desa diatur dalam PP 72 tahun 2005 pada ayat 43 sampai ayat 50, mulai dari pembentuk panitia samoai dilantikan calon sebagai kepala desa, yakni:

#### Pasal 43

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

#### Pasal 44

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- f. penduduk desa setempat;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;



- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- j. memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

#### Pasal 45

Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

#### Pasal 46

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

#### Pasal 47

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD, membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

#### Pasal 48

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjurian dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 49

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

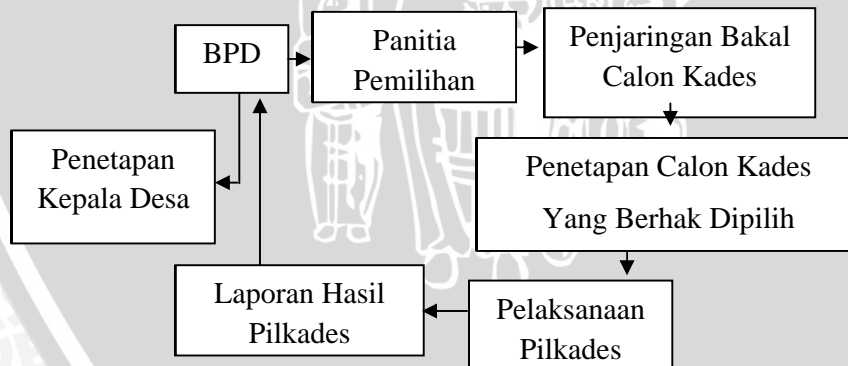
Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (5) Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan dibawah ini mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu,

**Bagan 2.1**

**Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**



**Sumber:** Panitia pelaksanaan Pilkades 2008

## C. PARTISIPASI POLITIK

### 1. Pengertian

Partisipasi Politik memiliki dua kata yaitu “partisipasi” dan “politik”. Kata partisipasi berasal dari bahasa latin “*participatio*” yang berarti mengambil bagian, maka partisipasi mengandung pengertian aktif, yaitu “adanya kegiatan atau aktivitas”.

Menurut Daves *dalam* Taliziduhu Ndaha. (1987). ada tiga hal ciri-ciri partisipasi, yaitu”

- a. Titik berat partisipasi, adalah mental dan emosi kehadiran secara pribadi dalam suatu kelompok tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu partisipasi.
- b. Kesiediaan untuk memberikan kontribusi tujuan yang dapat diwujudkan dalam bermacam-macam, misalnya barang, jasa, uang bahkan pikiran dan ketrampilan.
- c. Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha untuk mengambil bagian dalam pertanggung jawaban

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi tidak hanya menyangkut hal yang bersifat nyata secara fisik tetapi menyangkut hal yang bersifat non-fisik seperti buah pikiran, ketrampilan serta keterlibatan mental dan emosional individu ataupun kelompok.

Sedangkan pengertian politik “pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*Politics*) merupakan kegiatan yang bermacam-macam dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem politik tersebut dan juga melaksanakan tujuan itu. (Miriam Budiarmo, 1985)

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas kemudian memunculkan pendapat beberapa ahli baru mengenai partisipasi politik, yakni:

- a. Miriam Budiarmo (1998), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (*public policy*).
- b. Herbert McClosky *dalam* Miriam Budiarmo (1998), partisipasi politik adalah kegiatan sukarela (voluntary) dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung



(direct) atau tidak secara langsung (indirect) dalam proses pembentukan kebijakan umum.

- c. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990), partisipasi politik adalah kegiatan warga preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- d. Surbakti (1992), Kegiatan masyarakat yang disebut partisipasi politik adalah perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik, perilaku politik masyarakat (individu/kelompok) yang berhak mempengaruhi lembaga dan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan politik, karena menyangkut kehidupan masyarakat.
- e. Tjokroamidjojo (1991), pertama, partisipasi politik aktif masyarakat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan; kedua, keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.
- f. Alexander Abe (2001), Partisipasi politik masyarakat merupakan hal terpenting dalam pembangunan desa, yaitu akan menjadi wahana political education yang sangat baik.
- g. Katz (1965), partisipasi politik masyarakat diwujudkan melalui partisipasi politik dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi.
- h. Dusseldorp (1994), salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian. Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya public policy. Sehingga kualitas dari hierarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kepasifan (apatis) dari bentuk partisipasi politik masyarakat.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990), membatasi pengertian partisipasi politik pada beberapa hal diantaranya adalah:

- a. Partisipasi politik hanyalah kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Sebagai kontras, sementara sarjana mendefinisikan partisipasi politik

sebagai juga mencakup orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik, serta perilaku politik yang nyata. Pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai kompetisi dan keefektifan politik, persepsi-persepsi tentang relevansi politik, itu semua seringkali dapat berkaitan erat dengan tindakan politik, akan tetapi seringkali juga tidak. Tetapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana berbagi sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk tindakan politik.

- b. Partisipasi politik dalam warga negara preman (biasa), bukan pejabat-pejabat pemerintah. Hal tersebut didasarkan pada jabatan-jabatan pemerintah yang mempunyai pekerjaan profesional di bidang tersebut, padahal justru kajian ini pada warga negara biasa.
- c. Kegiatan partisipasi politik hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan yang dimaksudkan misalnya membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk mengagalkan keputusan agar pemerintah lebih tanggap terhadap keinginan-keinginan mereka. Hal tersebut merupakan tindakan-tindakan yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, terlepas apakah itu legal atau tidak. Sebagai contoh: aksi protes-protes, demonstrasi bahkan bentuk kekerasan pemberontakan.
- d. Partisipasi politik juga mencakupi semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil ataupun gagal.
- e. Partisipasi politik berupa kegiatan yang mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak langsung. Dalam arti langsung oleh pelakunya itu sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan pemerintah.

Menurut Miriam Budiarmo (1985) "kegiatan partisipasi ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*Contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya".

Dari beberapa pengertian partisipasi politik diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur partisipasi politik, yaitu:

1. Adanya kegiatan warga negara baik perorangan atau kelompok.
2. Sukarela yang dilakukan secara sadar dan ikhlas, bebas dari pengaruh atau tekanan dari manapun dan siapapun.
3. Dilakukan secara legal yang tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tujuan dari partisipasi politik adalah:
  - a. Memilih kepala desa atau penguasa.



- b. Mempengaruhi kebijakan pemerintah atau tindakan penguasa.
5. Kegiatan yang dilakukan:
    - a. Memberikan suara dalam pemilihan umum.
    - b. Menghadiri rapat umum.
    - c. Menjadikan anggota suatu kelompok kepentingan.

Maka keterlibatan masyarakat Desa Sumber Brantas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Plikades) dapat disebut sebagai Partisipasi Politik, yang mana masyarakat Desa Sumber Brantas memenuhi persyaratan untuk memilih, dipilih ataupun tidak memilih secara sukarela ikut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serit keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

## 2. Fungsi Partisipasi Politik

Ada empat fungsi partisipasi politik menurut Lane, Robert *dalam* Sastroatmodjo (1995) yaitu:

- a. Sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya – upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai untuk mencari keuntungan material.
- b. Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena bergaul dengan pejabat – pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik sehingga dengan demikian orang-orang tersebut akan puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.
- c. Sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, dalam hal ini orang berpartisipasi dalam politik dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan – tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek dan tender, melicinkan karier bagi jabatannya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan makin mendorong partisipasinya dalam politik.



- d. Sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin, perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

Bagi pemerintah, partisipasi politik warga negara mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

- a. Partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. Hal tersebut berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. Partisipasi Politik ini diarahkan dan didorong oleh pemerintah untuk mendukung pemerintah.
- b. Partisipasi Politik masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
- c. Partisipasi Politik dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan masukan, sarana, kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- d. Partisipasi Politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dalam pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijaksanaan.

### 3. Bentuk Partisipasi Politik

Terlepas dari tipe sistem politik yang bersangkutan, yaitu segera muncul dalam ingatan peranan para politisi profesional, para pemberi suara, aktivis-aktivis partai, dan para demonstran, ada sedikit kesulitan dalam penyajian berbagai bentuk partisipasi politik. Hierarki partisipasi politik tersebut berlaku di berbagai tipe sistem politik. Tetapi arti masing-masing tingkat tersebut bisa berbeda dari sistem yang satu ke sistem politik yang lain. Selain itu, Rush dan Althoff juga mengingatkan bahwa partisipasi pada suatu tingkatan tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi.

Pada puncak hierarki terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan, baik para pemegang jabatan politik maupun anggota birokrasi

pada berbagai tingkatan. Mereka ini berkepentingan langsung dengan pelaksanaan kekuatan politik formal. Di bawah para pemegang jabatan-jabatan politik formal adalah para anggota dari berbagai organisasi politik atau semi-politik. Termasuk disini adalah semua tipe partai politik dan kelompok kepentingan. Kesamaan antara partai politik dan kelompok kepentingan terletak pada peranan keduanya sebagai agen-agen mobilisasi politik. Baik partai politik maupun kelompok kepentingan merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah yang memungkinkan para anggota masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan politik. Termasuk dalam kegiatan tersebut adalah usaha mempertahankan gagasan, posisi, orang atau kelompok-kelompok tertentu melalui sistem politik yang bersangkutan.

Perbedaan antara partai politik dan kelompok kepentingan terletak pada sikap mereka. Kelompok kepentingan adalah organisasi yang berusaha memajukan, mempertahankan, atau mewakili sikap-sikap yang terbatas atau khas. Yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok kepentingan hanyalah kepentingan-kepentingan kelompok mereka masing-masing. Yang diperjuangkan kelompok kepentingan, misalnya penghapusan undang-undang tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingannya. Begitu tujuannya tercapai, perjuangan kelompok yang bersangkutan pun berhenti. Sedangkan partai politik berusaha memajukan, mempertahankan atau mewakili spektrum sikap yang lebih luas. Jika tujuan perjuangan kelompok kepentingan bersifat terbatas, maka tujuan perjuangan partai politik lebih luas. Dikatakan lebih luas karena perjuangan partai politik lebih menyangkut kepentingan publik daripada kepentingan kelompok semata. Dari segi dukungan, dukungan terhadap partai politik jelas lebih luas.

Partisipasi dalam partai politik dan kelompok kepentingan dapat bersifat aktif maupun pasif. Dikatakan aktif, apabila orang-orang yang bersangkutan yang menduduki suatu jabatan tertentu, memberikan dukungan keuangan atau membayar iuran keanggotaan. Hal-hal ini tidak perlu dilakukan oleh mereka yang berpartisipasi secara pasif. Dalam proses, orang bisa beralih dari partisipan aktif maupun partisipan pasif atau sebaliknya.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990) dalam bukunya "*partisipasi politik di negara berkembang*" membedakan bentuk perilaku partisipai politik sebagai berikut:



- a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- b. Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Contoh adalah kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi, oposisi terhadap, suatu usul legislatif atau keputusan administratif tertentu.
- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Menjadi anggota organisasi sudah merupakan bentuk partisipasi politik tak peduli apakah orang yang bersangkutan ikut aktif atau tidak dalam upaya organisasi itu mempengaruhi pemerintah.
- d. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e. Tindak kekerasan (*violence*) merupakan bentuk partisipasi politik sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (kudeta, pembunuhan), mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah (huruhara, pemberontakan), atau mengubah seluruh sistem politik (revolusi).

Menurut pendapat Gabriel A. Almond, dalam Mochtar Mas`oed dan Collin Mc Andrews (1986), menyatakan bahwa “Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang Normal dalam demokrasi modern, bentuk non konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan / ketidakpuasan warga negara.

1. Bentuk partisipasi politik yang konvensional meliputi :
  - a. Pemberian suara ( *voting* )
  - b. Diskusi politik
  - c. Kegiatan kampanye
  - d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan



- e. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif
2. Bentuk partisipasi politik yang non konvensional meliputi:
    - a. Pengajuan petisi
    - b. Berdemonstrasi
    - c. Konfrontasi
    - d. Mogok
    - e. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda
    - f. Tindak kekerasan politik terhadap manusia

Di negara–negara demokratis seperti di Indonesia, pemilihan Umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi politik rakyat. Apabila partisipasi masyarakat telah cukup tinggi berarti masyarakat telah menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan sekaligus juga merupakan adanya suatu pengakuan tentang kedaulatan yang berada ditangan rakyat.

#### 4. Sifat Partisipasi Politik

**Samuel P. Huntington** dan **Joan Nelson** (1990) dalam “*Partisipasi politik di negara berkembang*” mengemukakan Partisipasi Politik berdasarkan sifat yaitu: “ *autonomous participation* “ (partisipasi Otonom ) dan “ *mobilized participation* “ (partisipasi yang dimobilisasikan) untuk dapat memasukkan kedua kategori, yang otonom dan yang dimobilisasikan terdapat beberapa argumen mengenai pola-pola partisipasi politik, Diantaranya :

- a. Perbedaan antara partisipasi yang di mobilisasikan dan partisipasi yang otonom adalah lebih tajam dalam prinsip daripada di dalam realitas. Selain itu, kriteria untuk membedakan kategori-kategori dikotomis yang dapat dibedakan dengan tajam satu sama lain.
- b. Boleh dikatakan semua sistem politik mencakup suatu campuran partisipasi yang dimobilisasikan dan partisipasi yang otonom. Hanya saja yang membedakan adalah kadarnya pada tingkat tindakan individual dan pada tingkat sitem-sistem politik.
- c. Untuk menelaah baik partisipasi yang dimobilisasikan maupun partisipasi yang otonom adalah adanya hubungan yang dinamik antara kedua kategori. Perilaku yang pada mulanya merupakan partisipasi yang dimobilisasikan dapat menjadi diinternalisasikan, dalam artian pada

umumnya otonom. Begitu pula sebaliknya partisipasi yang tadinya bersifat otonom dapat menjadi partisipasi yang dimobilisasikan.

- d. Untuk meneliti baik kegiatan yang dimobilisasikan maupun kegiatan yang otonom adalah bahwa keduanya mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi sistem politik. Baik partisipasi yang dimobilisasikan maupun partisipasi yang otonom memberikan peluang- peluang kepemimpinan dan menimbulkan kekangan-kekangan terhadap pemimpin-pemimpin politik.

Dengan demikian partisipasi politik masyarakat pada dasarnya dapat bersifat otonom maupun dimobilisasikan, maka yang terkait dengan hal tersebut adalah motivasi-motivasi politik merupakan hal yang kompleks dan kotriversial.

## 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

### 1. Faktor Sosial Ekonomi

Menurut Miriam Budiarto (1985) yang mengatakan: “Bahwa pendapatan (*Income*), pendidikan dan status merupakan faktor yang penting dalam proses partisipasi politik atau dengan perkataan lain orang yang pendapatannya tinggi, berpendidikan baik dan berstatus sosial yang tinggi cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi daripada orang yang berpendapatan serta pendidikannya rendah.” Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah keluarga.

### 2. Faktor Politik

Peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi:

- a. Komunikasi Politik. Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika (Surbakti, 1992).
- b. Kesadaran Politik. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (Budiarto, 1985).



c. Pengetahuan Masyarakat terhadap Proses Pengambilan Keputusan. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil (Ramlan Surbakti 1992).

d. Kontrol Masyarakat terhadap Kebijakan Publik. Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik, kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah the power of directing. Juga mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi atau masukan (ide, gagasan) tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat, untuk meningkatkan kesadaran kritis dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan aktual dan merumuskan agenda tuntutan mengenai pembangunan.

### 3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan Faktor fisik individu.

Sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya.

### 4. Faktor Nilai Budaya

Nilai budaya politik merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik atau peradapan masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

Menurut Frank Lindenfeld bahwa faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, Ia menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik. Dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi.



Empat faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, antara lain:

a. Sejauh mana orang menerima perangsang politik.

Karena adanya perangsang, maka seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui mass media atau melalui diskusi formal.

b. Faktor karakteristik pribadi seseorang.

Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya hankamrata, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.

c. Karakteristik sosial seseorang.

Karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lain tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.

d. Keadaan politik.

Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Partisipasi politik masyarakat memiliki perbedaan dalam tingkat dan intensitasnya. Tinggi rendahnya intensitas partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan politik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang timbul baik dari dirinya sendiri maupun faktor-faktor yang melingkupinya. Gabriel A Almodn, dalam Mochtar Mas`oed dan Collin Mc Andrews (1982)

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:”Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik antara lain: pendidikan tinggi, status sosial ekonomi, keanggotaan dalam partai politik”.

Mengenai faktor pendidikan tinggi yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi dalam bidang politik selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut: “Pendidikan tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik, mungkin karena pendidikan tinggi bisa memberikan informasi tentang politik dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa dan menciptakan minat dan kemampuan politik.” (Gabriel A Almond dan Mochtar Mas’oed dan Collin Mc Andrews, 1982).

Sedangkan status sosial dan kondisi sosial ekonomi dijelaskan dalam pendapat yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo (1985) yang mengatakan : “Bahwa pendapatan (*income*), pendidikan dan status merupakan faktor yang penting dalam proses partisipasi politik atau dengan perkataan lain orang yang pendapatannya tinggi, berpendidikan baik dan berstatus sosial yang tinggi cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi daripada orang yang berpendapatan serta pendidikannya rendah.”

Menurut Surbakti, dalam Sastroatmojo (1995) menyebutkan bahwa terdapat dua aspek penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yakni aspek kesadaran politik seseorang dan kepercayaan politik terhadap pemerintah. Kesadaran terhadap hak sebagai warga negara baik hak-hal politik, hak ekonomi, maupun hak-hak mendapat jaminan sosial dan hukum. Kesadaran terhadap kewajiban sebagai warga negara baik kewajiban dalam sistem politik, kehidupan sosial dan kewajiban lain ikut memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang:

- a. Menyangkut seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang akan lingkungan masyarakat dan politik disekitarnya dan menyangkut minat dan perhatiannya terhadap lingkungannya.
- b. Menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan maupun terhadap



pelaksanaan pemerintahannya. Penilaian itu merupakan rangkaian dari kepercayaannya.

#### **D. Hubungan Partisipasi Politik dan Pilihan Kepala Desa**

Salah satu indikator matangnya demokrasi suatu bangsa adalah tingginya partisipasi politik warganya. Dalam konteks ini, partisipasi yang dikehendaki adalah proses transformasi kepentingan public dalam ranah struktur politik. Dipilih dan Memilih sesungguhnya merupakan posisi yang sama, yakni berpartisipasi dalam ranah politik. Partisipasi politik pada umumnya masih dimaknai pendek, yakni keikutsertaan warga dalam mencoblos di TPS di kala pemilu. Sehingga diskursus tentang kualitas partisipasi politik di Indonesia berkuat pada seputar pada tinggi rendahnya kehadiran pemilih di TPS. Fenomena kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara atau TPS dalam konteks pemilu akhir-akhir ini mengalami penurunan. Ada dua faktor utama yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi politik dalam pemilu, pertama menyangkut persoalan kendala teknis pemilih untuk mencoblos. (Irvan Mawardi, 2008)

Dalam situasi pemilih memiliki pertimbangan politis pragmatis yang demikian, maka hukum ekonomi pun berlaku. Parpol yang sangat berkepentingan dengan kehadiran serta pilihan politik calon pemilih mencoba melakukan praktek *money politik*. Praktek politik uang berbagai macam bentuknya, mulai yang paling halus, seperti calon *incumbent* memberi bantuan untuk fasilitas umum dan yang paling kasar dengan membagi amplop yang berisi uang dengan sistem door to door. Terkadang juga parpol atau kandidat membuat sebuah acara keagamaan kemudian para peserta mendapat uang, istilah uang transportasi. Singkatnya, akibat sulitnya mendorong kemandirian partisipasi politik warga, maka yang muncul adalah praktek pragmatisme. Dalam posisi ini, partisipasi politik menjadi mahal. Di suatu tempat di Jawa Timur misalnya, tidak segan-segan sekelompok warga menawarkan harga/tarif atas partisipasi mereka ketika pilkada kepada pasangan yang akan berlaga.

Ketidak hadirannya pemilih di TPS tidak hanya menjadi persoalan bagi parpol. Pihak penyelenggara pun merasa berkepentingan atas kehadiran pemilih di



TPS. Salah satu indikator kualitas kinerja KPU sampai di level PPS adalah tingginya kehadiran pemilih. Dengan demikian Panitia Pemilihan Suara (PPS) di setiap TPS melakukan berbagai cara untuk mengajak pemilih datang ke TPS. Mulai dari membuat desain TPS yang unik dan menarik, sampai pada penyediaan snack konsumsi untuk pemilih yang datang mencoblos.

Dalam situasi idealisme pemilih yang cenderung kritis, parpol dan penyelenggara pemilu justru mengambil tindakan yang kontraproduktif. Kebijakan yang “memfasilitasi” pragmatisme pemilih dengan berbagai pelayanan material yang serba karitatif adalah tindakan yang kurang tepat. Langkah yang ditempuh dengan mengikuti “pasar” yang diminta pemilih adalah tindakan kontraproduktif untuk penguatan nilai demokratisasi. Partisipasi politik dalam konteks demokratisasi adalah partisipasi politik yang berlandaskan beberapa hal; Pertama, pemilih harus memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam menentukan pilihan politik mereka. Adanya pemberian fasilitas seperti kaos dan money politik secara nyata mencabut kemandirian pemilih. Adanya adagium.”ambil uangnya, tolak partainya” ternyata tidak mudah terjadi di lapangan. Yang terjadi adalah” ambil uangnya dan tetap coblos partainya”.

Kedua, pemilih mesti rasional dan dewasa dalam menentukan pilihan politiknya. Rasionalitas pemilih tidak bisa diukur dengan kehadiran mereka di TPS. Ketidakhadiran mereka di TPS bagi sebagian pemilih adalah bagian dari rasionalitas pemilih. Itulah pilihan politiknya. Tindakan PPS yang meninabobokan pemilih dengan layanan uang per TPS sesungguhnya tindakan kurang tepat dalam melahirkan kedewasaan berpolitik. KPU beserta jajarannya dengan anggaran yang ada semestinya melakukan serangkaian kegiatan untuk melakukan pendidikan politik bagi warga. Sehingga mereka akan datang dengan kesadaran dan kedewasaan berpolitik.

Ketika, pemilih dalam menentukan pilihan politiknya harus berangkat dari idealisme tentang politik itu sendiri. Meskipun cenderung dan terkesan elitis, pemilih mesti memiliki idealisme terhadap pilihan politiknya. Di sinilah tugas parpol sebagai media melakukan komunikasi politik. Partai politik harus mampu menjelaskan dan mengimplementasikan program parpol ke pemilih. Parpol harus mampu menjelaskan ideology dan program kerjanya. Biarkanlah pemilih yang

menentukan pilihan politik mana yang sesuai dengan nurani mereka. Tentunya parpol yang secara nyata memiliki ideology dan agenda yang mensejahterakan mereka.

Kegagalan parpol dan KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam mendorong partisipasi politik warga justru akan semakin menjadi partisipasi warga tidak sehat dan memakan biaya yang tinggi. Ketika partisipasi politik semakin mahal, maka kedaulatan ada di tangan yang memiliki modal. Dan inilah lonceng kematian bagi demokrasi.

Dengan melihat hal-hali diatas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan partisipasi politik masyarakat dengan pilkades adalah saling mendukung apabila salah satu diantara tidak mendukung maka kesejahteraan masyarakat akan berkurang ataupun sebaliknya apabila tidak partisipasi masyarakat akan dapat mengurangi kedemokrasian bangsa indonesia. Oleh karena itu partisipasi politik masyarakat harus dapat ditingkatkan dari tahunketahun supaya dapat menjadikan bangsa Indonesia ini demokrasi dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Penelitian seperti ini biasanya dilakukan tanpa hipotesa yang telah dirumuskan secara ketat. Adakalanya menggunakan hipotesa tetapi bukan untuk diuji secara statistik. (Singarimbun, 1989)

Dalam penelitian ini menggunakan jenis rancangan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsi secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai berbagai sifat dan faktor tertentu. Penelitian deskriptif, analisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel. Bersifat deduktif yaitu berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum, diterapkan untuk menjelaskan seperangkat data. Jadi merupakan pemaparan menghubungkan seperangkat data dengan seperangkat data.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan yang dimulai dengan problematik yang dihadapi peneliti. Problematik atau permasalahan tersebut dikaji secara teoritis, dicari dasar-dasar rasionalitasnya. Berdasarkan kajian teoritis yang ada, dapat juga dirumuskan hipotesis atau jawaban sementara atau dugaan sementara atas masalah tersebut tetapi bukan untuk diuji secara statistik.

##### B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian disini adalah pengungkapan data tentang obyek atau titik perhatian beserta aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Fokus penelitian diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan dalam usaha pengumpulan data, karena menunjukan pada indikator dari sesuatu yang akan diteliti.

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk dan Sifat partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Sumberbrantas periode 2008-2013 :
  - a. Sifat Partisipasi Politik



1. Partisipasi Otonom (Kesadaran sendiri)
2. Partisipasi Yang Dimobilisasi (Pengaruh orang lain)
- b. Bentuk partisipasi politik masyarakat desa dalam kaitanya dengan pilkades
  1. Partisipasi dalam Kegiatan kampanye
  2. Partisipasi dalam Pemungutan suara
  3. Partisipasi dalam Penghitungan suara
2. Faktor-faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Sumberbrantas :
  1. Faktor status sosial ekonomi masyarakat
  2. Faktor tingkat pendidikan masyarakat
  3. Faktor kualitas calon kepala desa

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di desa sumber brantas kecamatan bumiaji batu dengan pertimbangan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di desa sumber brantas tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk partisipasi masyarakat baik bentuk konvensional diantaranya: kegiatan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat sebenarnya peneliti menangkap fenomena dari obyek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Penetapan situs penelitian ini didasarkan untuk memperoleh keabsahan data aktualisasi data yang berhubungan dengan peneliti. Dengan demikian situs yang tepat dan terkait dengan objek yang akan diteliti adalah:

- a. Kantor Kepala Desa Sumberbrantas
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa
- c. Masyarakat Desa Sumberbrantas

Adapun alasan pengambilan situs penelitian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa tempat-tempat tersebut mampu memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diangkat.

#### **D. Sumber Data**

Data merupakan sumber informasi yang digunakan sebagai pokok kajian dalam melakukan penelitian, oleh karena itu data-data tersebut haruslah digali dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh hasil yang baik. Sumber data utama adalah data kualitatif yang berupa kata-kata, tindakan-tindakan, sedangkan data kuantitatif yang berupa angka-angka sebagai penguat, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil kuisioner serta wawancara atau keterangan langsung yang diolah dengan :

- a. Kepala Desa Sumberbrantas
- b. Tokoh Masyarakat Desa Sumberbrantas
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberbrantas Periode 2008-2013
- d. Masyarakat Desa Sumberbrantas

##### **2. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, melainkan dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang dijadikan pendukung sumber-sumber data primer yang telah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari:

- a. Data yang berupa dokumen-dokumen resmi
- b. Media massa baik cetak (majalah, koran) maupun elektronik (televisi, radio, situs internet)
- c. Laporan hasil penelitian lain.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode yang penggunaannya akan disesuaikan dengan jenis dan sifat yang diperlukan, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan sumber-sumber data primer yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memperoleh data yang aktual yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Kuisioner

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan penyelidikan suatu masalah yang banyak menyangkut kepentingan umum, dengan cara mengedarkan formulir daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada sejumlah subyek, untuk mendapatkan jawaban (tanggapan respon) tertulis seperlunya.

3. Observasi

Yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap obyek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data. Sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ismani HP dan Suryadi (1991: 139) bahwa: “peneliti mengadakan pengamatan dengan mempergunakan alat-alat inderanya untuk menangkap fakta dan mengerti data yang terdapat dalam obyek penelitiannya”.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pencatatan, menganalisa, ataupun meringkas dokumen-dokumen dan juga surat-surat resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

## **F. Instrumen penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang dipergunakan untuk pengumpulan data-data penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Dalam hal ini peneliti sebagai alat yang terlibat secara langsung mengamati terhadap berbagai peristiwa maupun gejala-gejala dan fenomena yang sedang berlangsung.

2. Pedoman Wawancara dan kuisioner

Merupakan seperangkat alat bantu yang berupa daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk dipertanyakan kepada nara sumber di dalam melakukan pengumpulan data yang terkait dengan fokus peneliti.

3. Catatan Lapangan (Field Note)



Yaitu buku catatan dan alat tulis yang akan digunakan untuk mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian.

### G. Analisis Data

Dalam hal ini analisis yang dimaksud untuk dapat membarikan makna yang berguna dalam mencapai suatu kesimpulan guna memecahkan masalah penelitian. Menurut Moleong (2002) Analisis Data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja yang disarankan oleh data. Sesuai dengan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian keahlitif dan kuantitatif, maka dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan data transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis saat penelitian.

#### 2. Data Display

Penyajian data atau sekumpulan informasi tersusun dalam tabel, grafik dan sebagainya yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

#### 3. Menarik kesimpulan atau ferivikasi selama penelitian berlangsung.

Makna-makna yang muncul dari data akan diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecerdasannya. Verivikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.

Kemudian adalah dengan memberikan penafsiran atau interprestasi terhadap data yang diperoleh, terutama data yang langsung berhubungan dengan fokus, interpretasi data langsung akan menggambarkan pandangan peneliti sesuai dengan pemahaman teori terhadap teori hasil kepustakaan yang relevan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Keadaan Geografis

Desa Sumberbrantas merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Propinsi Jawa Timur. Desa Sumberbrantas memiliki luas wilayah 541, 1364 Ha yang dibagi kedalam tiga dusun yaitu: Dusun Jurang Kual, Dusun Krajan, dan Dusun Lemah Putih. Jarak dari pemerintah kecamatan desa 13 km dan dari pemerintah kota berjarak 18 km. Dengan demikian wilayah Desa Sumberbrantas ini dapat dikatakan desa yang paling unjung karena wilayahnya yang jauh dari pusat kota terutama dengan pemerintah kota.

Desa Sumberbrantas merupakan desa termuda di Kota batu, yang merupakan hasil pemekaran wilayah Desa Tulungrejo dan dulunya adalah sebuah Dusun yang merupakan bagian dari wilayah Desa Tulungrejo. Tetapi karena adanya pemekaran wilayah dusun sumberbrantas per tanggal 20 desember 2005 menjadi desa sendiri yang dipimpin oleh seorang Pj. Kepala Desa Persiapan Sumberbrantas, dengan tujuan supaya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal serta dapat mempermudah pelayanan.

Karena hampir sebagian besar wilayah kota Batu berada di daerah pegunungan sehingga letak Desa Sumberbrantas juga terletak di daerah yang tinggi pula. Apabila di hitung ketinggian tanah dari permukaan laut, maka Desa Sumberbrantas terletak pada 1.700 m di atas permukaan laut., dengan curah hujan yang tinggi dengan suhu rata-rata 12°c s/d 24 °c.

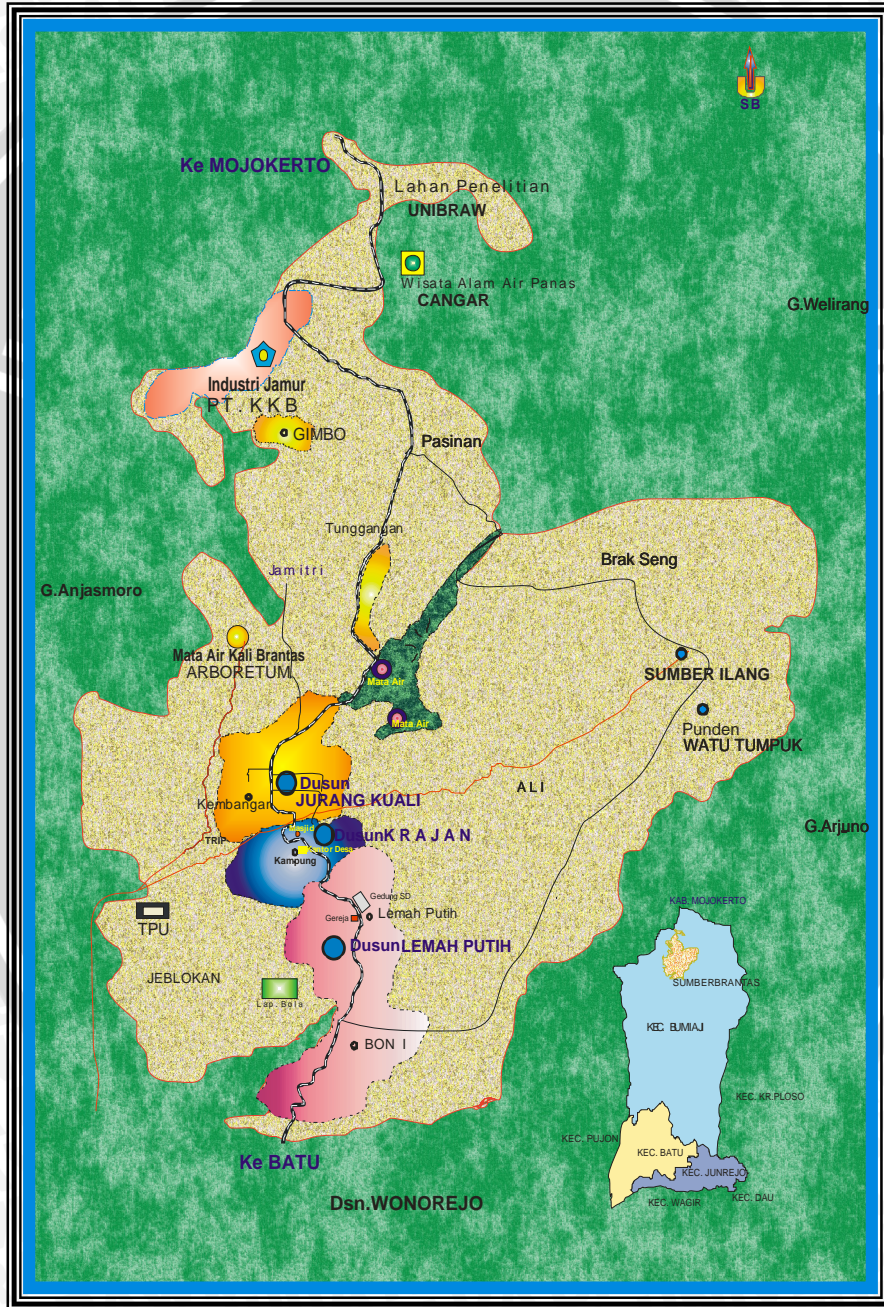
Sebagian besar wilayah Desa Sumberbrantas diperuntukan sebagai lahan pertanian, sedangkan selebihnya dipergunakan untuk pemukiman, perkarangan, makam, lapangan, sekolah, tempat Rekreasi (ARBORETUM dan CANGAR), tempat-tempat ibadah dan Budidaya Jamur / PT.Karya Kompos Bagus.



Sedangkan batas-batas wilayah desa Sumberbrantas dapat dilihat sebagai berikut:

- Utara : Hutan / Kabupaten Mojokerto
- Timur : Hutan Gunung Arjuno
- Selatan : Dusun Wonorejo Desa Tulungrejo dan Hutan
- Barat : Hutan Gunung Anjasmoro / Kabupaten Jombang

**Gambar 4.1**  
**Peta Wilayah Desa Sumberbrantas**



**Sumber:** Monografi Desa Sumberbrantas, 2008



## b. Keadaan Penduduk

Apabila dilihat dari jumlah penduduk Desa Sumberbrantas sebesar 4089 jiwa yang terdiri dari 2081 jiwa jenis kelamin laki-laki dan 2081 jiwa jenis kelamin perempuan. Dari penduduk yang berjumlah 4089 jiwa terbagi lagi ke dalam 1058 Kepala Keluarga (KK) berdasarkan data monografi Desa Sumberbrantas pada bulan tahun 2008. Dari hal tersebut kita dapat melihat bahwa perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adanya perimbangan yang sama. Namun untuk lebih jelasnya komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.I**  
**Jumlah Penduduk Sumberbrantas tahun 2008**  
**Menurut Klasifikasi Umur**

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	%
1.	0 – 4	349	8,54
2.	5 – 9	327	7,99
3.	10 - 14	421	10,29
4.	15 – 19	634	15,51
5.	20 - 24	408	9,98
6.	25 – 29	314	7,68
7.	30 – 34	405	9,90
8.	35 – 39	354	8,67
9.	40 – 44	272	6,65
10.	45 – 49	257	6,29
11.	50 – 54	226	5,53
12.	55 ke atas	122	2,97
	<b>Jumlah</b>	<b>4089</b>	<b>100</b>

**Sumber:** Monografi Desa Sumberbrantas, 2008

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase terbesar merupakan jumlah penduduk pada kelompok umur 15-19 tahun yang berjumlah 634 jiwa atau sekitar 15.51% dari jumlah keseluruhan. Sedangkan persentase terendah merupakan jumlah penduduk pada umur 55 tahun ke atas yang berjumlah 122 jiwa atau sekitar 2.97 % dari jumlah keseluruhan. Dari hal tersebut dapat menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan kelompok umur sekolah menengah menduduki jumlah penduduk terbesar.

### c. Keadaan Perekonomian

Gambaran mengenai keadaan perekonomian Desa Sumberbrantas dapat dilihat dari mata pencaharian mereka. Jenis mata pencaharian penduduknya juga sangat beraneka ragam akan tetapi sebagian besar penduduk Desa Sumberbrantas bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian lagi bermata pencaharian sebagai buruh tani, pegawai swasta, pedagang, pegawai negeri sipil dan mata pencaharian lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Diagram berikut ini:

**Diagram 4.I**  
**Jumlah Penduduk Desa Sumberbrantas tahun 2008**  
**Menurut Mata Pencaharian**



**Sumber:** Monografi Desa Sumberbrantas, 2008

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Desa Sumberbrantas mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Karena Sekitar 318,3234Ha dijadikan lahan pertanian maka kepemilikan lahan pertanian di Desa Sumberbrantas juga banyak dibandingkan akan buruh tani. Petani disini merupakan sebagai pengelola lahan yang dibantu oleh buruh tani dengan sistem gaji per minggu atau per bulan. Sedangkan sejumlah penduduk lainnya juga ada yang bermata pencaharian sebagai pegawai swasta dan berdagang yang sebagian besar dari mereka yang tidak memiliki lahan pertanian.



Di Desa Sumberbrantas juga ada sedikit penduduk yang tidak bekerja menurut hasil wawancara dengan Bpk Natanael Purwanto (salah satu perangkat desa) menyebutkan bahwa

“...Penduduk yang tidak bekerja sebagian besar adalah anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMA dan orang-orang yang sudah tua atau lansia”. (Wawancara tanggal 22 febuari 2009, pukul 17:50 WIB)

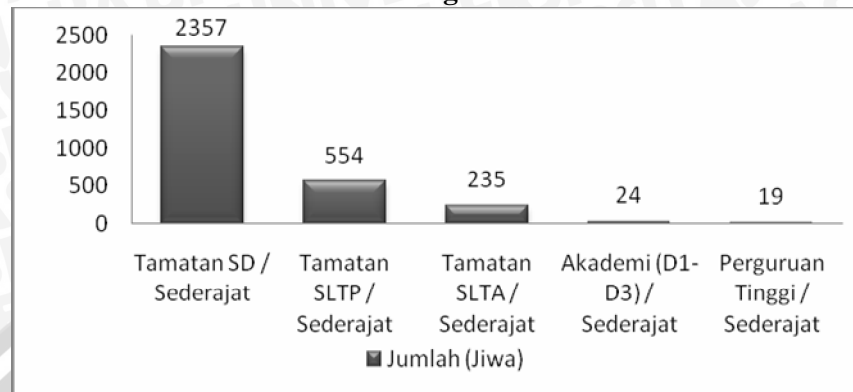
#### **d. Keadaan Sosial Budaya**

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat pedesaan sebagian besar masih menganut pada nilai-nilai tradisi dan adat istiadat yang diwarisi barlanjut dari generasi ke generasi secara dinamis, bahkan penguasaan akan adat istiadat merupakan salah satu faktor yang menentukan kredibilitas sebagai pemimpin baik formal ataupun informal.

Pendidikan sebagai mata rantai kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, juga merupakan faktor yang menentukan dalam kelancaran proses pembangunan bangsa dan negara. Di lain pihak pendidikan dipandang sebagai ukuran kemajuan suatu masyarakat.

Sebagian besar penduduk Desa Sumberbrantas, apabila dilihat dari segi pendidikannya adalah lulusan Sekolah Dasar (SD). Sebagian besar alasan mereka untuk tidak melanjutkan sekolah adalah dikarenakan ketiadaan biaya untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Penghasilan yang didapat hanya dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

**Diagram 4.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Sumberbrantas tahun 2008**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



**Sumber:** Monografi Desa Sumberbrantas, 2008

Berdasarkan pada diagram diatas maka dapat dilihat bahwa kondisi tingkat pendidikan penduduk Desa Sumberbrantas adalah tamatan SD. Dari tabel tersebut dapat dilihat juga bahwa dari sejumlah penduduk yang tingkat pendidikan hanya tamatan SD dengan penduduk dengan jumlah yang tamat dari SLTP mempunyai rentang jumlah yang sangat mencolok, yang dapat diartikan bahwa jumlah penduduk yang tidak melanjutkan sekolahnya sampai tingkat SLTP juga tinggi. Untuk menunjang pembangunan di bidang pendidikan, di Desa Sumberbrantas ini juga terdapat sarana pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan juga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang baru di bangun pada tahun 2005, sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Desa masih belum memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Sekolah Bidang Pendidikan**  
**Desa Sumberbrantas tahun 2008**

No.	Sekolah	Jumlah
1.	Taman kanak-kanak	1
2.	Sekolah dasar	1
3.	SLTP	1
4.	SLTA	-
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>

**Sumber:** Monografi Desa Sumberbrantas, 2008



Berdasarkan tabel diatas, prasarana pendidikan yang ada di Desa Sumberbrantas sudah dapat dikatakan memadai. Untuk menampung anak-anak usia sekolah dirasa telah mencukupi dimana untuk prasarana pendidikan dari taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) sampai pada tingkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) telah dibangun di Desa ini. Sedabfkan untuk anak-anak Desa Sumberbrantas ini yang lulusan SLTP dapat melanjutkan pendidikanya pada SLTA yang terdekat dengan desa ataupun SLTA yang berada di Ibu kota Kecamatan.

Jumlah penduduk menurut penganut agama di Desa Sumberbrantas, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Sumberbrantas Tahun 2008**  
**Berdasarkan Agama**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	3986
2.	Kristen	98
3.	Katholik	5
<b>JUMLAH</b>		4089

**Sumber:** Monografi Desa Sumberbrantas, 2008

Berdasarkan diagram diatas jelas terlihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Sumberbrantas adalah pemeluk Agama Islam. Pada dasarnya penduduk desa Sumberbrantas mempunyai tradisi dan adat istiadat yang bernuansa Islam karena penduduk aslinya memang baragama Islam, sedangkan sebagai pemeluk agama lainnya berasal dari masyarakat pendatang, baik dari luar daerah maupun dari daerah itu sendiri. Namun hal itu bukan merupakan halangan untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di Desa ini oleh seluruh warga baik kalangan pendatang maupun warga dari penduduk asli desa tersebut.

Hal ini didukung oleh adanya sarana yang dimiliki untuk menunjang kehidupan beragama terlihat dari banyaknya sarana ibadah. Sejalan dengan banyaknya penganut agama Islam, jumlah masjid dan langgar atau mushola yang dapat dijumpai di Desa Sumberbrantas. Untuk mengetahui

lebih jelasnya jumlah sarana ibadah di Desa Sumberbrantas dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Sarana Ibadah**  
**Desa Sumberbrantas Tahun 2008**

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Gereja	1
3.	Mushola	10
4.	Vihara	-
5.	Pura	-
6.	Aliran Kepercayaan	1
7.	TPQ	2
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>

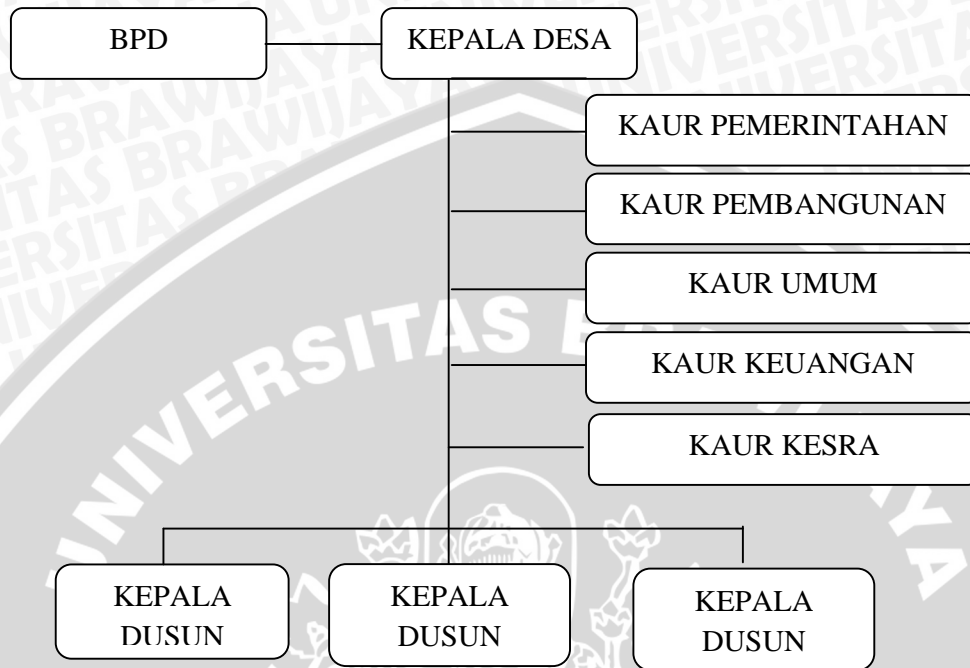
**Sumber:** Monografi Desa Sumberbrantas, 2008

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa salah satu contoh adat istiadat yang masih dijunjung tinggi adalah dengan masih kuatnya ikatan gotong royong antara warga baik itu dari kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah. Adanya kegiatan kerja bakti bagi seluruh warga merupakan waktu yang baik sebagai ajang untuk saling bersilahturahmi secara tidak langsung diantara warga. Gotong royong ini juga dicerminkan apabila di Desa tersebut mengadakan acara-acara yang berupa selamatan maupun kegiatan-kegiatan lainnya.

#### **e. Keadaan Sosial Politik**

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif, Desa Sumberbrantas terdiri dari 3 (tiga) Dusun dengan 6 (enam) RW. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Kepala Desa Sumberbrantas dan sekretaris Desa dibantu oleh 9 (sembilan) Perangkat Desa, Dengan Pola 5 (lima) kepala urusan.

**Bagan 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa**  
**Dengan Pola 5 (Lima) Kepala Urusan**



**Sumber:** Monografi Desa Sumberbrantas, 2008

**Keterangan:**

1. Kepala Urusan Pemerintahan  
 Mempunyai tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan; membantu pemungutan pajak retribusi dan pendapatan lain; membantu tugas di bidang keagrariaan, bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
2. Kepala Urusan Pembangunan  
 Mempunyai tugas melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, dan kegiatan perekonomian lainnya; melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan; melakukan kegiatan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan; membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan desa; melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan desa.
3. Kepala Urusan Umum  
 Mempunyai tugas melaksanakan administrasi aparat pemerintah desa; melakukan urusan perlengkapan dan investasi desa; melakukan urusan rumah tangga; mengatur rapat-rapat Dinas dan upacara; melakukan surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi.



#### 4. Kepala Urusan Keuangan

Mempunyai tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang desa; mengurus dan membayar gaji kepala desa dan perangkat desa; mengurus pembukuan, keuangan desa, dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa.

#### 5. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas melakukan bimbingan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, dan pendidikan; melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan; membantu pengumpulan dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana; membantu pelaksanaan bimbingan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya; membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq, Shadaqah, dan dana sosial lainnya.

Berdasarkan struktur organisasi Pemerintahan desa Sumberbrantas tersebut, maka dapat dijelaskan Kepala Desa selaku orang nomor satu di Desa Sumberbrantas menduduki jabatan tertinggi dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah mitra kerja Pemerintah Desa. Kemudian lembaga pemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan juga merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakatan Desa.

Kepala Desa membawahi Sekertaris Desa yang bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Sekertaris Desa membawahi Kepala Urusan. Kepala Desa juga membawahi kepala Dusun, Kepala Dusun Sumberbrantas dibagi menjadi 3 (tiga) Kepala Dusun, yaitu: Kepala Dusun Jurang Quali, Kepala Dusun Krajan, dan Kepala Dusun Lemah Putih. Tujuan dibentuk kepala dusun adalah untuk membantu tugas-tugas Kepala Desa mengingat luas wilayah Desa Sumberbrantas sangat luas. Masing-masing kepala Dusun mempunyai wewenang dan tanggungjawab mengurus wilayah Dusunya masing-masing, dalam setiap satu bulan wajib melapor kepada Kepala Desa dalam rapat kerja perangkat Desa.

Adapun sarana Pemerintah Desa Sumberbrantas guna mendukung kelancaran pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Balai Desa : 1(satu) buah
- b. Kantor Desa : 1 (satu) buah

- c. Tanah Bengkok Pamong Desa : -
- d. Tanah Kas Desa : 12,7000 Ha

### **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa bertindak sebagai penengah antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, dengan kata lain Badan Permusyawaratan Desa merupakan tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang berhubungan dengan desa.

Badan Permusyawaratan Desa berkendudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, dan berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

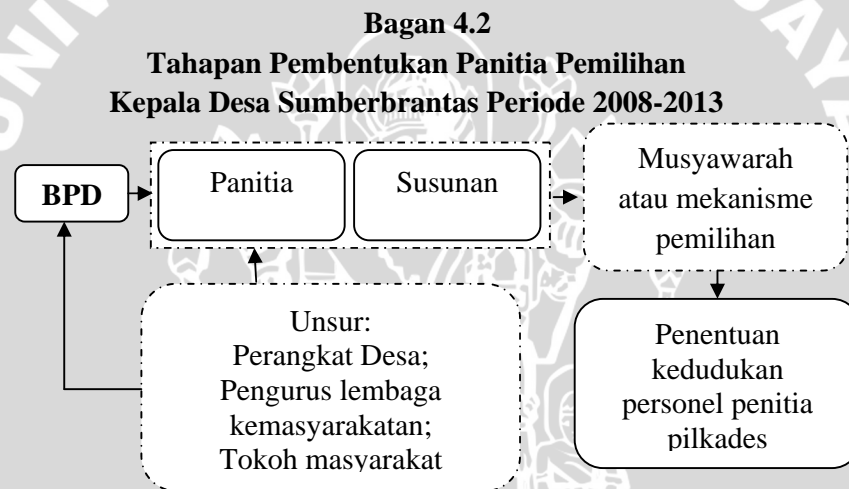
- a. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa. ( Keputusan BPD Sumberbrantas no.01/BPD/KEP 1/2009 tentang penetapan struktur BPD Sumberbrantas)

Di sisi lain Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat. Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberbrantas diketuai oleh Bapak H.M.Y. Joko lesmono dengan dibantu oleh Bapak Juwadi Selaku wakil Ketua yang beranggotakan 7 (tujuh) orang. Selain tanggungjawab diatas Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tanggungjawab dalam urusan pembentukan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.

## 2. Gambaran Umum Situs Penelitian

### a. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Panitia pemilihan kepala desa adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Badan Pemusyawaratan Desa untuk melaksanakan pemilihan kepala desa melalui musyawarah dari unsur Kepala Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberbrants dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Sumberbrantas Nomor: 03/ BPD/KEP/I/2008 tanggal 11 Januari 2008 dan Susunan Kepanitiaan serta unsur-unsur yang ada didalamnya ditetapkan berdasarkan pasal 3 Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2006.



**Sumber:** Monografi Desa Sumberbrantas, 2008

Panitia kepala desa memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan pada Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2007
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Mempunyai Wewenang :
  - a. Membuat tata tertib Pemilihan Kepala Desa
  - b. Menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa
  - c. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
  - d. Melakukan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
  - e. Melakukan Pemeriksaan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
  - f. Melaksanakan Pendaftaran Pemilih dan pengesahan daftar Pemilih sementara maupun daftar Pemilih Tetap

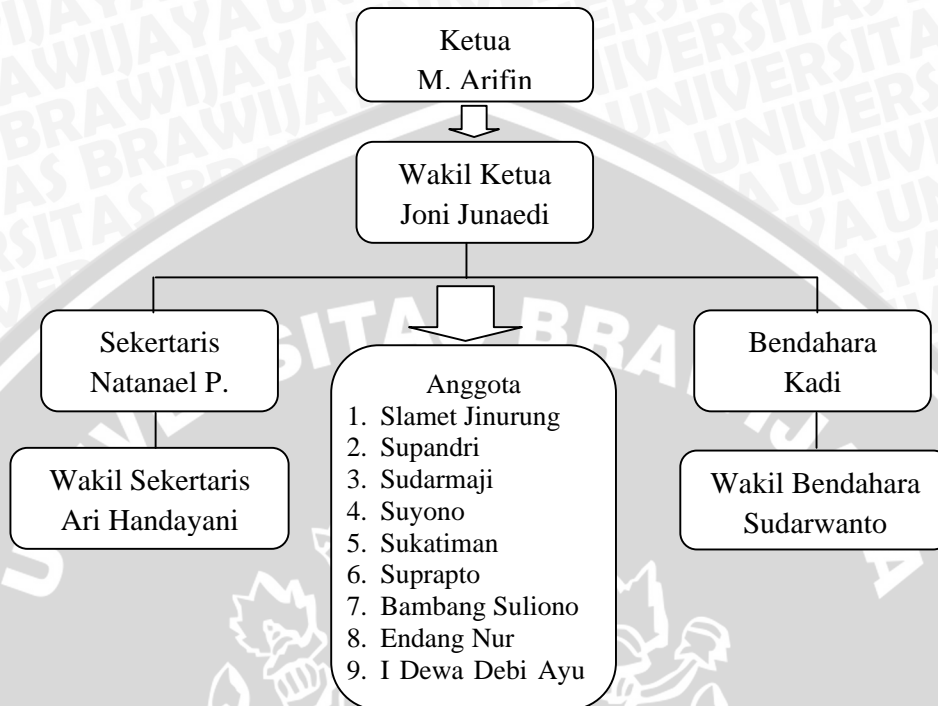


- g. Melaksanakan pengadaan surat suara yang memuat Tanda gambar/foto dan nama calon Kepala Desa
  - h. Menetapkan sanksi pelanggaran atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
  - i. Menyampaikan surat panggilan kepada pemilih
  - j. Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa
  - k. Membuat Berita acara Pemilihan
  - l. Menetapkan Calon Kepala Desa
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberbrantas dalam melaksanakan tugasnya melaporkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kepada BPD;

Panitia Pemilihan Kepala Desa sumberbrantas periode 2008-2013 diketuai oleh Bapak M.Arifin dengan dibantu oleh bapak Joni Junaedi selaku wakil ketua, Bapak Natanael Purwanto selaku Sekertaris dan Bapak Kadi selaku bendahara Panitia Kepala Desa Sumberbrantas periode 2008-2013, yang beranggotakan 9 orang. Di mana selain babarapa tugas diatas, panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberbrantas periode 2008-2013 bertanggungjawab kepada Badan Pemusyawarana Desa dalam hal mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa yang penggunaan anggaran, melalui laporan partanggungjawaban hasil pemilihan kepala desa sumberbrantas periode 2008-2013.



**Bagan 4.3**  
**Struktur Panitia Pemilihan**  
**Kepala Desa Sumberbrantas Periode 2008-2013**



**Sumber:** Monografi Desa Sumberbrantas, 2008

**b. Desa Sumberbrantas**

Secara geografis desa sumberbrantas terletak di daerah pegunungan dengan luas wilayah 541, 1364 Ha dan merupakan daerah perbatasan antara kabupaten malang dengan kabupaten mojokerto. Jumlah penduduknya sekitar 4089 jiwa dengan 1058 Kepala Keluarga (KK). Mata pencaharian penduduk desa sumberbrantas sebagian besar adalah petani dan sebagian lagi bekerja sebagai buruh tani, pegawai swasta, pedagang, dan tidak banyak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Didesa sumberbrantas terdapat tiga dusun yaitu: jurangkuali, krajan, dan dusun lemah putih.

Dalam pelaksanaan pemilihan desa sumberbrantas periode 2008-2013, jumlah penduduk yang memiliki hak pilih sebanyak 2.908 orang yang berkumpul di satu tempat pemungutan suara, yang dilaksanakan bersamaan di Balai Pertemuan Desa Sumberbrantas. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan terhitung sebagai suara sah sebanyak 2.640 orang dan 268 orang warga lainnya tidak hadir. Sementara itu jumlah suara sah ada

sebanyak 2.624, dan 16 suara yang dianggap tidak sah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat desa Sumberbrantas dalam pemungutan suara sebesar 90.78%. selain itu, Partisipasi Politik masyarakat dalam kegiatan kampanye dan kegiatan perhitungan suara dapat dikatakan tinggi. Berikut ini merupakan tabel Rekapitulasi Hak pilih Desa Sumberbrantas.

**Tabel 4.5**  
**Rekapitulasi Jumlah Hak Pilih**  
**Desa Sumberbrantas Tahun 2008**

RW	RT	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
01	1	41	40	81
	2	37	50	87
	3	57	51	108
	4	42	43	85
	5	42	46	88
	6	35	37	72
	7	35	36	71
	8	36	32	68
02	1	46	35	81
	2	48	52	100
	3	44	52	96
	4	46	42	88
	5	54	58	112
	6	41	44	85
	7	66	56	122
	8	38	40	78
03	1	48	39	87
	2	33	30	63
	3	25	28	53
	4	47	48	95
04	1	47	61	108
	2	49	42	91
	3	44	48	92
05	1	42	56	98
	2	48	41	89
	3	36	33	69
	4	45	38	83
	5	36	32	68
	6	53	60	113
06	1	37	32	69
	2	38	31	69
	3	37	38	75
	4	48	46	94
	5	34	29	70
JUMLAH		1455	1453	2908

**Sumber:** Panitia Pilkades Desa Sumberbrantas, 2008



### 3. Gambaran Umum Responden

**Tabel 4.6**  
**Karakteristik Responden**  
**Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	%
1	17-25	56	28
2	26-34	48	24
3	35-43	38	19
4	44-52	36	18
5	> 53	22	11
	TOTAL	200	100

Sumber: data yang diolah

Dari data tabel 4.6 tingkat Partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala desa apabila dilihat dari usia pemilih yang menggunakan hak pilihnya masyarakat usia 17-25 tahun memiliki tingkat partisipasi paling tinggi. Hal itu dikarenakan pada usia 17-25 tahun merupakan usia produktif dimana masyarakat turut berpartisipasi dalam sosialisasi pemilihan kepala desa sehingga dapat menyebabkan masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

**Tabel 4.7**  
**Karakteristik Responden**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	82	41
2	Perempuan	118	59
	TOTAL	200	100

Sumber: data yang diolah

Faktor jenis kelamin dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, hal ini terlihat dari penambahan jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan. Namun secara total dari tahun ketahun penduduk perempuan jumlahnya selalu banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jenis kelamin memiliki perbedaan dalam karakteristik dan tingkah laku politik sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat berdasarkan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan partisipasi yang otonom lebih tinggi laki-laki daripada perempuan.

**Tabel 4.8**  
**Karakteristik Responden**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Tamat SD	44	22
2	Tamat SMP	48	24
3	Tamat SMU	52	26
4	Akademi (D2-D3)	22	11
5	Perguruan tinggi (mahasiswa)	34	17
	TOTAL	200	100

Sumber: data yang diolah

Partisipasi politik seseorang dapat dipengaruhi oleh pendidikan seseorang. Namun faktor utama yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah status ekonomi. Dengan status ekonomim yang tinggi akan mempengaruhi seseorang untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik sehingga masyarakat akan mempengaruhi seseorang untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik sehingga masyarakat akan memperoleh informasi politik.

**Tabel 4.9**  
**Karakteristik Responden**  
**Berdasarkan Tingkat Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Pegawai negeri	3	1.5
2	Petani	65	32.5
3	Buruh Tani	50	25
4	Swasta	15	7.5
5	Pedagang	29	14.5
6	Ibu Rumah Tangga	38	19
	TOTAL	200	100

Sumber: data yang diolah

Status sosial masyarakat merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat yang disebabkan oleh pekerjaan ataupun penghasilan. Faktor pekerjaan dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Beranekaragam pekerjaan masyarakat dalam kelompok tertentu yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat.

#### 4. Penyajian Data Fokus penelitian

##### a. Sifat dan Bentuk Partisipasi Politik

###### 1) Partisipasi dalam Kegiatan Kampanye

Kegiatan kampanye merupakan ajang bagi calon kepala desa untuk mensosialisasikan visi dan misi kepemimpinannya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh dukungan guna memperoleh suara terbanyak. Dalam kegiatan ini disoroti pula sejauh mana kegiatan kampanye para calon kepala desa melibatkan partisipasi politik masyarakat dan sebaliknya sejauh mana pula masyarakat melibatkan diri dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala desa tersebut.

Dalam mekanisme pemilihan langsung, kampanye merupakan sarana yang efektif untuk menarik simpati warga masyarakat pemegang hak pilih. Kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah dilakukan dalam bentuk pawai akbar kelima calon kepala desa secara bersama-sama, penempelan spanduk, penyebaran pamflet, penyampain visi misi kelima calon di balai pertemuan warga dan disiarkan langsung melalui televisi loka Batu. Semua bentuk kampanye tersebut diharapkan adanya partisipasi masyarakat. Kegiatan kampanye yang dilakukan para calon kepala desa mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat desa Sumberbrantas. Hal tersebut dibuktikan dengan antusiasme masyarakat dalam mengikuti berbagai kegiatan kampanye yang diselenggarakan para calon.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Natanael Purwanto selaku salah satu panitia pilkades dan sebagai salah satu perangkat Desa yaitu sebagai berikut:

"....Jika di rata-rata tingkat Partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan kampanye dapat dikatakan tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kegiatan pawai arak-arakanke lima calon Kepala Desa yang dilangsungkan secara barsama-sama. Masyarakat lebih antusias dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa demi memperjuangkan Desa menuju keadaan yang lebih baik. Tingkat Partisipasi politik dalam kegiatan kampanye tinggi sebagian disebabkan hal ini baru pertama kali dilaksanakan di desa sini". (hasil wawancara pada hari minggu tanggal 22 Febuari 2009, pukul 17.50 WIB).



Hal ini juga didukung oleh Bapak Miftakul Ulum, SP (salah satu masyarakat desa Sumberbrantas) menyatakan sebagai berikut:

“...Partisipasi masyarakat Desa Sumberbrantas dapat dikatakan tinggi hal ini terbukti dari kampanye yang dilakukan ke Lima calon kepala desa sudah bagus dilihat dari sudah adanya gambar-gambar foto calon kepala desa di jalan-jalan dan juga sudah diadakan melekan dirumah-rumah calon kepala desa kurang lebih 1 bulan sebelum dilaksanakan pilihan. Masyarakat pada waktu pilkades dilaksanakan mereka semua rame-rame datang ke TPS yang bertempat digedung balai desa Sumberbrantas”. (Hasil wawancara tanggal 20 febuari 2009 pukul 11.00 Wib)

Namun Partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala desa di Desa Sumberbrantas yang terjadi sedikit permasalahan yaitu Perbuatan *Money Politik* oleh Calon dan atau Tim Kampanye yang sukar dibuktikan serta batasan-batasannya yang membedakan antara money politik dan upah kerja yang merupakan bagian dari biaya kampanye atau dalam kata lain adanya multitafsir yang berbeda antara Panwas Pilkades dan Tim kampanye dalam hal tersebut.

Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden, yakni dengan Bpk.Sudarmanto (salah satu tokoh masyarakat di Desa Sumberbrantas) yang menyatakan bahwa:

“.....Money Politic wajar yang mana tidak hanya pilkades sebagai ajang judi akan tetapi Pemilihan-Pemilihan lain juga dijadikan ajang Judi dan juga melibatkan masyarakat dalam money Politic baik dalam hal pemberian uang ataupun dalam bentuk yang lain. Akan tetapi hal ini dapat dijadikan pembelajaran kepada masyarakat untuk pemilihan-pemilihan yang akan datang, karena pilihan kepala desa yang masih baru pertama kali dilaksanakan di Desa sini”. (hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 21 Febuari 2009, pukul 02.15 WIB).

Pernyataan diatas juga didukung oleh Bpk. Kadi (salah satu masyarakat Desa Sumberbrantas) yang lain yang menyatakan bahwa:

“.....Politik uang itu memang ada akan tetapi sulit untuk merabanya, apalagi didesa yang baru pertama kali melakukan pilihan Kepala Desa, itu tidak bias ditelusuri karena sulit dan semu. Jadi itu hanya bisa dicegah dari diri kita sendiri apabila ada yang memberi uang untuk menyusuh mencoblos uangnya diambil tapi urusan coblos mencoblos itu adalah hak kita. Jadi dapat dikatakan kalau adanya Money politik

ataupun judi itu sudah wajar”. (hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2009, pukul 10.50 WIB).

Dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah tersebut, Partisipasi yang diberikan masyarakat yang datang atas kemauan dan kesadaran sendiri atau karena digerakkan oleh seseorang atau sekelompok orang agar turut serta berpartisipasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sumberbrantas menunjukkan bahwa sifat Partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala Desa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya: kondisi social ekonomi, kondisi lingkungan, tingkat pendidikan masyarakat, dll. Untuk mengetahui tingkat Partisipasi masyarakat karena kemauan sendiri ataupun karena digerakkan oleh seseorang ataupun kelompok di Desa Sumberbrantas dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.10**  
**Tingkat kehadiran masyarakat dalam Kampanye Tahun 2008**  
**Di Desa Sumberbrantas**

No	Kegiatan Kampanye	Tingkat Kehadiran	Ketidakhadiran	Jumlah
1.	Mengikuti Kegiatan tatap muka dan pemaparan visi misi langsung dibalai Desa	143	57	200
2.	Kegiatan Debat Publik calon kepala desa	33	163	200

Sumber: data primer yang diolah

Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa kegiatan kampanye yang diikuti masyarakat desa Sumberbrantas dalam kegiatan kampanye sangat tinggi baik dalam mengikuti kegiatan tatap muka dan pemaparan visi misi yang dilakukan langsung dibalai desa ataupun kegiatan debat publik calon kepala desa. Hal ini dibuktikan dari 200 responden 143 dan 33 responden mengikuti kegiatan kampanye. Sifat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan kampanye dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.11**  
**Sifat Partisipasi politik masyarakat dalam Kampanye Tahun 2008**  
**Di Desa Sumberbrantas**

No	Kegiatan Kampanye	Otonom	%	Mobilitas
1.	Mengikuti Kegiatan tatap muka dan pemaparan visi misi langsung dibalai Desa	143	72	-
2.	Kegiatan Debat Publik calon kepala desa	33	16	-
3.	Tidak mengikuti kegiatan kampanye	24	12	-
	Jumlah	200	100	-

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa kegiatan kampanye yang diikuti masyarakat yang berada di Desa Sumberbrantas hampir sebagian besar mengikuti kegiatan tatap muka dan pemaparan visi dan misi atas kesadaran sendiri dan tidak ada masyarakat yang mengikuti kegiatan tatap muka dan pemaparan visi dan misi karena digerakkan oleh calon Kepala Desa ataupun oleh tim sukses calon, begitu juga dengan masyarakat yang mengikuti debat publik antar calon Kepala Desa.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan kampanye yang bersifat otonom. Partisipasi politik masyarakat yang bersifat otonom lebih didasari karena ingin berubah serta ingin menjadi lebih baik dari pemerintah sebelumnya serta tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, status ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Bapak Natanael Purwanto selaku salah satu panitia pilkades dan sebagai salah satu perangkat Desa Sumberbrantas menyatakan bahwa:

“..... Jika saya melihat masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye memiliki alasan yang baik, antara lain mereka ingin tahu mengenai visi misi calon, mendukung salah satu calon Kepala Desa ataupun hanya ingin sekedar meramaikan kegiatan kampanye, dan saya tidak melihat ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat, seperti pendidikan, tatus social, ataupun lingkungan. Hal ini juga karena ini baru pertama kali dlaksanakan pilkades di Desa sini”. (hasil wawancara pada hari minggu tanggal 22 Febuari 2009, pukul 17.50 WIB).



## 2) Partisipasi dalam Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon. Kegiatan pemungutan suara merupakan tahap yang paling menentukan bagi seorang calon kepala desa, karena pada kesempatan ini akan ditentukan berhasil tidaknya yang bersangkutan memangku jabatan sebagai kepala desa tersebut berdasarkan besar kecilnya jumlah suara yang diperolehnya.

Kegiatan pemberian suara untuk pemilihan kepala desa dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar calon dalam surat suara. Pencoblosan dilakukan di suatu bilik suara yang tertutup, sehingga menjamin kerahasiaan pilihan. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai suatu bentuk Partisipasi yang paling kecil intensitasnya, karena hanya menurut keterlibatan yang minimal dari individu serta akan berhenti bila pemberian suara telah dilakukan. Walaupun bentuk pemberian suara ini merupakan Partisipasi politik masyarakat yang intensitasnya kecil, tetapi kegiatan ini umumnya mampu melibatkan penduduk dalam lingkup yang luas.

Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberbrantas periode 2008-2013 ini, pemungutan suara dilaksanakan secara serempak pada hari kamis tanggal 17 April 2009; pukul 07.00 Wib Sampai dengan 13.00 Wib, melalui TPS yang berada di Balai Pertemuan warga Desa Sumberbrantas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Desa Sumberbrantas berlangsung tanpa ada kendala yang berarti. Tentunya hal tersebut tercipta didukung oleh beberapa faktor, diantaranya karena baru pertama kali diadakan pemilihan Kepala Desa dan terutama lebih sederhananya proses pemungutan suara pemilihan. Selain itu panitia Pilkades sudah jauh-jauh hari untuk mensosialisasikan Pilihan Kepala Desa yang Bebas, Adil dan Rahasia. Hal ini didukung oleh pernyataan Bpk M.Arifin selaku ketua panitia Pilihan Kepala Desa, sebagai berikut:

“.... Tidak ada kendala yang berarti dalam pilkades 2008 ini, hal ini karena Panitia sudah melakukan persiapan yang bagus seperti pemberian sosialisasi kepada masyarakat tentang Pilkades kurang lebih 30 hari sebelumnya.” (Hasil wawancara tanggal 22 Febuari 2009, pukul 01.30 WIB)

Kegiatan Pemilihan Kepala desa bukanlah merupakan tujuan, melainkan sarana untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Oleh karena itu tinggi rendahnya tingkat Partisipasi politik masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa tidak bisa dinilai hanya dari banyak sedikitnya jumlah pemilih yang memberikan suara pada hari pemungutan suara. Untuk mengetahui jumlah masyarakat yang memberikan suara pada saat pemilihan kepala desa yaitu pada tanggal 17 April 2009 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.12**  
**Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkades Periode 2008-2013**  
**Di Desa Sumberbrantas**

Daftar Pemilih Tetap tahun 2008	Jumlah perolehan suara sah	Jumlah Suara tidak sah	Jumlah suara yang tidak hadir
2.908	2.624	16	268

Sumber: Panitia Pelaksanaan Pilkades

Berdasarkan tabel 4.11 Dapat diketahui partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemungutan suara. Di Desa Sumberbrantas, jumlah pemilih yang mempunyai hak pilih sebesar 2.908 orang, jumlah perolehan suara sebanyak 2.640 orang, jumlah suara yang sah sebanyak 2624 orang sedangkan jumlah suara yang tidak sah sebanyak 16 Orang dan masyarakat yang tidak hadir sebesar 268 orang.

Sehingga dengan demikian dapat diketahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemungutan suara di Desa Sumberbrantas sebesar 90.78%. Dengan demikian tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara di Desa Sumberbrantas dikatakan tinggi apalagi mengingat pelaksanaan pilkades baru pertama kali di laksanakan di Desa Sumberbrantas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Natanael Purwanto salah satu panitia Pilkades menyatakan bahwa:

“...hanya sedikit masyarakat yang tidak hadir ke TPS atau tidak memberikan hak pilihnya, sekitar 200 orang. Hal ini dikarenakan adanya masyarakat yang sedang bekerja keluar daerah dan tidak bisa ikut untuk mencoblos dan juga banyak dari anak-anak yang harus sekolah baik yang sekolah SMA ataupun yang masih kuliah. Kebanyakan dari mereka yang kos dan jarang pulang kerumah, karena

waktu diselenggarakannya Pilkades merupakan hari aktif sekolah”. (Hasil wawancara tanggal 22 Febuari 2009 pukul 17.50 WIB)

Untuk mengetahui jumlah masyarakat pada setiap pedukuan dalam memberikan suara pada saat pemilihan kepala desa yaitu pada tanggal 17 April 2009 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.13**  
**Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara Pilkades di setiap Perdukuan Di Desa Sumberbrantas**

No	Nama Pedukuan	DPT	Memberikan suara	Yang tidak hadir
1	Lemah putih	1422	1301	121
2	Krajan	589	531	58
3	Jurang Kual	897	808	89
	Jumlah	2908	2640	268

Sumber: Panitia Pelaksanaan Pilkades 2008

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa baik tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan Desa maupun pada tingka pedukuan, antusias masyarakat dalam Pilkades sangat tinggi, mengingat masyarakat Desa Sumberbrantas baru pertama kali melaksanakan Pilihan Kepala Desa, setelah berpisah dari desa Tulungrejo semenjak tahun 2006. Tingkat ketidakhadiran masyarakat juga hanya 268 orang atau 9,21%, sebagian banyak adalah masyarakat yang kerja keluar dsaerah dan masyarakat yang masih duduk dibangku sekolah SLTA ataupun mahasiswa yang kost. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Natanael Purwanto selaku panitia Pilkades dan salah satu perangkat daerah, sebagai berikut:

“...ketidakhadiran sebagian banyak adalah masyarakat yang kerja diluar daerah dan anak-anak yang masih bersekolah dan kuliah, karena pada pelaksanaan pilkades kemarin dilaksankn pada hari kamis dan hari aktif kuliah”. (Wawancara tanggal 22 febuari pukul 17:50 WIB)

Untuk mengetahui sifat partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemungutan suara di Desa Sumberbrantas dapat dilihat dari tabel berikut:



**Tabel 4.14**  
**Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara Tahun 2008**  
**Di Desa Sumberbrantas**

No	Pemungutan Suara	Jumlah
1.	Hadir di TPS dan Mencoblos	183
2.	Tidak hadir ke TPS	17
	Jumlah	200

Sumber: Data yang diolah

Dari 200 responden 183 orang melakukan partisipasi politik dalam kegiatan pemungutan suara dan 17 responden yang tidak hadir untuk ikut berpartisipasi menyalurkan hak suara, hal ini dikarenakan dari kesemua responden yang tidak dapat hadir karena sebagian besar dari mereka yang masih bersekolah sehingga tidak dapat menghadiri pesta demokrasi yang pertama kali dilaksanakan di Desa Sumberbrantas. Sifat partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 4.15**  
**Sifat Partisipasi Politik dalam Pemungutan Suara Tahun 2008**  
**Di Desa Sumberbrantas**

No	Pemungutan Suara	Otonom	%	Mobilisasi
1	Hadir di TPS dan Mencoblos	183	91,5	-
2	Tidak hadir ke TPS	17	8,5	-
	Jumlah	200	100	-

Sumber: Data yang diolah

Tabel 4.15 menjelaskan partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemungutan suara di Desa Sumberbrantas, dimana masyarakat yang hadir di TPS dan mencoblos atas kesadaran sendiri sebanyak 183 responden dari 200 responden yang dipilih secara acak sedangkan masyarakat yang hadir di TPS dan mencoblos karena perintah calon ataupun tim sukses calon kepala desa tidak ada.

Secara acak Masyarakat yang tidak mencoblos atas kemauan sendiri sebanyak 17 responden (8.5 %), alasan yang dikemukakan oleh masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya karena sebagian besar dari responden yang masih duduk disekolah SLTA dan ada sebagian yang masih bekerja diluar daerah pada waktu dilaksanakan Pilkades.

Maka dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Politik dalam pemungutan suara bersifat otonom dan tidak ada masyarakat yang dipengaruhi oleh para calon Kepala desa ataupun tim sukses calon Kepala desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk.Kadi (salah satu tokoh masyarakat di Desa Sumberbrantas) menyatakan bahwa:

"...kegiatan pemungutan suara merupakan tahap yang menentukan jadi tidaknya calon Kepala Desa memegang jabatan tersebut. Oleh karena itu partisipasi yang kita berikan sangat penting dalam mendukung calon Kepala Desa yang sesuai dengan hati nurani. Meskipun ada pembagian rejeki seperti uang, souvenir, dll tetapi masalah mencoblos itu kembali pada individu masing-masing." (hasil wawancara tanggal 22 Febuari 2009 pukul 15.30 WIB).

### 3) Partisipasi dalam Penghitungan Suara

Kegiatan penghitungan suara diadakan setelah kegiatan pemungutan suara dinyatakan berakhir, maka dimulailah proses penghitungan suara. Dalam kegiatan ini, kehadiran anggota masyarakat mempunyai arti yang cukup penting karena dengan kehadiran masyarakat dalam penghitungan suara tersebut mereka bisa berperan sebagai saksi yang bilamana terdapat sesuatu yang kurang sesuai dengan yang seharusnya dalam penghitungan suara, misalnya suara yang tidak sah, dll. Masyarakat dapat memberikan kritik ataupun koreksi perbaikan untuk meluruskan jalannya penghitungan suara. Disamping itu, masyarakat yang hadir akan lebih dini mengetahui siapa calon yang memenangkan dalam pemilihan tersebut. Pelaksanaan kegiatan penghitungan suara di Desa Sumberbrantas berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti. Sebagaimana Tata tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2008.

Partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan penghitungan suara cukup tinggi, sebagaimana disampaikan oleh Bapak M. Arifin selaku ketua penyelenggaraan Pilkades, sebagai berikut:

". . . Kehadiran masyarakat dalam kegiatan penghitungan suara pemilihan kepala desa tinggi, dorongan rasa ingin tahu menyebabkan masyarakat mengikuti kegiatan tersebut". (Hasil wawancara tanggal 22 febuari 2009, pukul 01.30 WIB).

Untuk mengetahui sifat Partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan penghitungan suara di Desa Sumberbrantas dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.16**  
**Partisipasi politik masyarakat dalam Penghitungan Suara Tahun 2008**  
**Di Sumberbrantas 2008**

No.	Perhitungan suara	Jumlah
1	Mengikuti kegiatan penghitungan suara	128
2	Tidak mengikuti kegiatan perhitungan suara	72
<b>TOTAL</b>		<b>200</b>

Sumber: data primer yang diolah

Dari 200 responden 128 masyarakat yang mengikuti kegiatan perhitungan suara dan 72 responden tidak mengikuti kegiatan perhitungan suara, hal ini membuktikan bahwa antusias masyarakat Desa Sumberbrantas sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan perhitungan suara walaupun baru pertama kali dilaksanakan Pilkades di desa Sumberbrantas periode 2008-2013. Sifat partisipasi politik masyarakat dalam perhitungan suara tahun 2008 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 4.17**  
**Sifat Partisipasi politik masyarakat dalam Penghitungan Suara Tahun 2008**  
**Di Sumberbrantas 2008**

No.	Perhitungan suara	Otonom	%	Mobilisasi
1	Mengikuti kegiatan penghitungan suara	128	64	-
2	Tidak mengikuti kegiatan perhitungan suara	72	36	-
<b>TOTAL</b>		<b>200</b>	<b>100</b>	

Sumber: data primer yang diolah

Tabel diatas menjelaskan bahwa masyarakat yang mengikuti kegiatan penghitungan suara cukup baik, Masyarakat yang mengikuti kegiatan penghitungan suara atas kemauan sendiri sebanyak 128 responden dari 200 responden. Antusias warga dalam perhitungan suara sangat besar hal ini dikarenakan pesta demokrasi desa baru pertama kali dilaksanakan di Desa Sumberbrantas sehingga membuat masyarakat sangat ingin tahu.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kadi (salah satu tokoh masyarakat di Desa Sumberbrantas) menyatakan bahwa:

“....sebagian besar masyarakat Sumberbrantas yang mengikuti kegiatan perhitungan suara dari awal sampai akhir merupakan



masyarakat yang penasaran dan ingin tahu secara langsung proses perhitungan suara dan hasil pemilihan karena ini baru pertama kali dilaksanakan Pilkades". (Hasil wawancara tanggal 22 Febuari 2009, Pukul 10:50 WIB).

## **b. Faktor-Faktor yang Mendorong Partisipasi politik**

### **1. Faktor Status sosial Ekonomi**

Status sosial berarti kedudukan seseorang dalam kelompoknya yang disebabkan baik oleh tingkat pendidikan maupun oleh pekerjaan. Tingkat status sosial yang tinggi memungkinkan perilaku politik yang lebih berkualitas daripada seseorang yang berada dalam status sosial dibawahnya. Status sosial ekonomi ialah kedudukan seorang warga negara dalam pelapisan sosial yang disebabkan oleh kepemilikan kekayaan. Dengan status sosial ekonomi yang tinggi diperkirakan seseorang akan memiliki tingkat pengetahuan politik, minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah.

Status sosial ekonomi yang rendah akan mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi politik. Sebagian kaum miskin baik dipedesaab ataupun yang tinggal diperkotaan menghadapi berbagai rintangan untuk berpartisipasi, yang disebabkan kurangnya informasi tentang politik. Selain itu menurut mereka, partisipasi kelihatanya tidak ada gunanya apabila dibandingkan dengan urusan mereka yang pokok seperti mencari nafkah. Kebanyakan masalah-masalah yang dihadapi orang miskin adalah pekerjaan, pangan dan bantuan medis. Ada beberapa hal yang menyebabkan kurang partisipasi politik masyarakat pedesaan, salah satunya adalah lapisan-lapisan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Menurut mereka partisipasi politik tidak berpengaruh banyak dalam kehidupan mereka.

Demikian juga kondisi yang ada di dalam masyarakat kota Batu khususnya pada masyarakat desa Sumberbrantas juga terdapat berbagai jenis mata pencaharian sehingga menyebabkan kondisi status ekonomi masyarakat berbeda. Apabila kondisi status ekonomi dilihat dari tempat tinggal daftar pemilih tetap desa sumberbrantas dapat terlihat jenjang perekonomian mereka, adanya jenjang perekonomian itu dapat terlihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.18**  
**Mayoritas Penghasilan Masyarakat**  
**Desa Sumberbrantas 2008**

No	Nama Pedukuan	Jumlah penduduk	Mayoritas Penghasilan
1	Lemah putih	1422	Buruh tani
2	Krajan	589	Buruh tani dan Petani
3	Jurang KualI	897	Buruh tani dan Petani
	Jumlah	2908	

Sumber: monografi Desa Sumberbrantas, 2008

Dari tabel 4.18 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berada di pedukuan lemah putih lebih banyak dibandingkan didusun Krajan dan dusun Jurang kualI, begitu juga dengan mayoritas mata pencahariannya juga beragam, yaitu buruh tani dan petani. Disini yang dimaksud dengan buruh tani adalah masyarakat yang bekerja membantu petani (pemilik tanah) dan sebagian besar dari mereka yang tidak memiliki tanah garapan sendiri, buruh tani bekerja dari pukul 06.30-13.00 dengan gaji sekitar 15.000-20.000 per hari, sedangkan yang dimaksud petani disini adalah pemilik tanah dan memiliki tanah garapan berkisar antara 0.5-5 hektar per kepala keluarga.

Dilihat dari tabel diatas jumlah penduduk paling banyak adalah penduduk yang bertempat tinggal di dusun lemah putih dan sebagian besar merupakan buruh tani, dan pada tingkat penduduk pada dusun Jurang kualI dengan mayoritas mata pencahariannya sebagai buruh tani dan petani, sedangkan pada jumlah penduduk paling akhir adalah masyarakat dusun Krajan dengan mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai buruh tani dan petani.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perekonomian masyarakat dusun lemah putih kurang mapan karena dengan jumlah penduduk yang banyak tetapi tingkat penghasilan mereka yang pas-pasan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Tidak jarang dari masyarakat dusun lemah putih untuk mencari penghasilan diluar sebagai buruh tani yaitu dengan mencari kayu atau mencari rumput di hutan. Lain dengan sebagian besar masyarakat dusun Krajan dan masyarakat Dusun Jurang KualI, masyarakatnya memiliki tanah garapan dan dapat dilihat dari perekonomian mereka yang serba ada. Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu responden yaitu

Bpk.Sudarmanto (salah satu tokoh masyarakat di Desa Sumberbrantas) yang menyatakan bahwa:

“.....keberhasilan calon kepala desa dalam pilkades ditentukan juga dengan tempat tinggal mereka, yang mana jumlah penduduk yang banyak terdapat di dusun Lemah Putih maka tidak heran kalau dari ke lima kandidat kepala desa yang maju dalam pemilihan Kepala yaitu Prawito dari Dusun Jurang Kual, Suliono dari Dusun Lemah Putih, Sujianto dari Dusun Krajan, Drs.Parwito Sugeng dari Dusun Jurang Kual, dan Hadi Supikto dari Dusun Krajan. Maka tidak heran yang menang merupakan warga dusun lamah putih”. (Hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 21 Febuari 2009, pukul 02.15 WIB).

## 2. Faktor Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Masyarakat modern mempunyai tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat tradisional, hal tersebut masih dipengaruhi adanya perbedaan dalam status sosial dan ekonomi masyarakat. Didalam masyarakat yang berkembang ekonominya, secara otomatis masyarakat tersebut mempunyai penghasilan yang lebih tinggi, kekayaan yang lebih besar sehingga yang menyebabkan masyarakat tersebut mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan pendidikan yang tinggi, masyarakat akan memiliki tingkat pengetahuan politik, minat dan perhatian pada politik, serta sikap politik. Tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat untuk menerima berbagai informasi yang berkembang terutama dalam bidang politik dengan alasan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka kemampuan untuk menganalisa informasi politik melalui media masa yang ada maupun dengan komunikasi politik tertentu akan lebih obyektif.

Tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik dimana semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula kesadaran politiknya, demikian pula sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikannya maka semakin rendah pula tingkat kesadaran politiknya.



**Tabel 4.19**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**  
**Desa Sumberbrantas 2008**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamatan SD	2216
2.	Tamatan SLTP	414
3.	Tamatan SLTA	235
4.	Akademi	24
5.	Sarjana	19
	Jumlah	2908

Sumber: Monografi Desa Sumberbrantas, 2008

Dari bagan 4.15 dapat terlihat bahwa sebagian besar masyarakat desa sumberbrantas tingkat pendidikan mereka hanya tamatan Sekolah Dasar, hal ini membuktikan bahwa dengan penghasilan yang pas-pasan masyarakat Desa Sumberbrantas kurang mendapatkan pendidikan yang layak yaitu pendidikan 9 tahun, walaupun tingkat pendidikan rendah tetapi masyarakat Desa Sumberbrantas sangat antusias ikut ambila bagian dalam pesta demokrasi desa yang baru dilaksanakan di desa Sumberbrantas.

Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu responden yaitu Bpk. Miftakul Ulum, SP (salah satu tokoh masyarakat di Desa Sumberbrantas) yang menyatakan bahwa:

“...walaupun mayoritas penduduk desa masih banyak yang tamatan SD bahkan ada yang juga tidak lulus SD karena disamping tidak ketiadaan biaya juga dikarenakan menurut masyarakat pendidikan itu no dua yang penting hanya uang untuk dapat makan, tapi tidak jarang anak muda sekarang sudah males melanjutkan sekolah biarpun biaya juga ada. Biarpun begitu tetapi tingkat keikutsertaan dalam Pilkades sangat besar, karena masyarakat sangat merasakan sangat butuh perubahan dari Desa”.  
 (Hasil wawancara tanggal 20 febuari 2009 pukul 11.00 Wib)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak kadi (salah satu tokoh masyarakat di Desa Sumberbrantas) menyatakan bahwa:

“....pendidikan masyarakat desa tergolong rendah dikarenakan masyarakat yang menomor duakan sekolah dan mementingkan uang untuk kehidupan yang lebih lanjut, ya karena ketiadaan biaya sekolah yang mahal dan dulu kan Sekolah Tingkat Pertama (SLTP) yang jauh sehingga memelurkan biaya tambahan untuk naik angkot jadi mana bisa membagi penghasilan yang sedikit untuk sekolah. Tapi biarpun pendidikan rendah masyarakat juga ada yang mau melanjutkan sekolah

lanjutan paket sekarang”. (Hasil wawancara tanggal 22 Febuari 2009, Pukul 10:50 WIB).

### 3. Faktor kualitas kepala desa (figur calon kepala desa dan program kerja).

Kualitas kepala desa yang akan memimpin merupakan faktor yang sangat penting, yang mana masyarakat mengetahui tentang calon mulai dari sikap, tingkah laku sampai dengan bagaimana calon memimpin rumah tangganya. Dari kesemua penilaian tersebut akan terlihat bahwa calon mampu atau tidak dalam memimpin desa untuk lebih maju. Selain itu dimana masyarakat secara terbuka dihadapkan dengan bakal calon pemimipinnya. Berbeda dengan pilbup, pilgub, pilpres dan pileg. Pilkades tentu tidak identik dengan memilih kucing dalam karung. karena calon pemimpin yang akan dipilih adalah warga yang secara sosiologis mempunyai kedekatan tersendiri. Semua cela dan celah, baik dan buruk terlihat jelas.

Dengan demikian calon harus dapat membuat pendukungnya merasa simpati supaya dapat memenangkan Pilkades dan memimpin desa, oleh karena itu calon harus pintar-pintar mengatur strategi kampanye yang baik dan memiliki program kerja yang bagus. Tidak jarang para calon bersaing satu sama lain dalam menentukan strategi, diantaranya yaitu:

1. Kelima calon mengadakan acara “*melekan*” selama 1 bulan di rumah masing-masing dan pucaknya malam hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan, acara ini dilakukan untuk mendapatkan simpati dari warga yang terdekat tetangga dan saudara-saudara dekat dan juga masyarakat juga mengetahui bahwa calon akan ikut meramaikan pesta demokrasi desa dengan pemilihan kepala desa,
2. Ada juga calon yang membuat janji politik, dengan memanfaatkan kekurangan yang ada di Desa. Calon kepala desa membuat kontrak politik semacam janji seperti apabila calon terpilih akan membuat “BONG AIR” supaya warga sumbebrantas tidak kekurangan air dll,
3. Mengadakan pengajian, pengajian diadakan guna memberi kesempatan warga untuk mengenal calon lebih dekat dari sisi keagamaan,

4. Salah satu strategi yang digunakan mengadakan makan-makan pada hari pelaksanaan pemungutan suara,
5. Mendatangi kerumah-rumah penduduk, tujuan kunjungan calon biasanya adalah mengenalkan diri dan meminta doa restu,
6. Mendatangi acara warga seperti tahlilan, hal ini bertujuan untuk mengenalkan diri dan meminta doa restu apabila calon tidak ada waktu untuk datang kerumah masing-masing warga,
7. Pendekatan terhadap tokoh masyarakat, pendekatan ini dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja oleh setiap calon. Pendekatan ini bertujuan agar tokoh masyarakat tersebut dapat mempengaruhi dan bisa diajak bekerja sama untuk memobilisasi seluruh warga desa agar memilih calon.
8. Juga tidak jarang dari pendukung calon yang mendatangi dukun, supaya calon dapat memenangkan Pilkades

Sehingga masyarakat harus jeli-jelinya memilih calon kepala desa yang baik, transparan, adil dan berwibawa supaya dapat membawa desa sumberbrantas menjadi desa yang lebih baik.

## **b. Analisa Dan Pembahasan**

### **1. Bentuk Dan Sifat Partisipasi politik**

#### **a. Partisipasi dalam Kegiatan Kampanye**

Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa dimaksudkan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memperoleh dukungan suara guna memenangkan pemilihan dalam Pemilihan Kepala Desa. Tanpa adanya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa, masyarakat tidak akan mengenal dan mengetahui visi misi calon yang dituangkan dalam program-program yang diajukan dalam kampanye tersebut. Oleh karena itu kegiatan kampanye mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan kampanye Pilkades dalam rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji Kota Batu Periode 2008-2013 telah berjalan sesuai dengan jadwal dan aturan yang



telah ditetapkan. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon Kepala Desa di Desa Sumberbrantas dilakukan dalam bentuk pawai akbar yang dilakukan serempak oleh kelima calon dengan diarak keliling Desa menggunakan mobil, kegiatan tatap muka dan pemeparan visi & misi, penempelan spanduk, penyebaran pamflet, dan debat publik yang disiarkan melalui televisi. Kegiatan kampanye Pilkades tersebut mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat di Desa Sumberbranta. Kegiatan arak-arakan roda empat selama kampanye berjalan meriah dan terkendali sesuai dengan harapan panitia dan masyarakat, apalagi melihat bahwa kegiatan Pilkades baru pertama kali di adakan di Desa Sumberbrantas.

Partisipasi Politik masyarakat dalam kegiatan kampanye di Desa Sumberbrantas dapat dikatakan tinggi dan hampir tidak terdapat permasalahan yang berarti dan tidak sampai mengganggu jalannya Pilihan Kepala Desa. Walaupun ada pemberian uang (*Money Politik*) yang dapat mempengaruhi calon pemilih tetapi hal ini tidak sampai membuat masalah, tapi hal ini juga tidak dapat dibuktikan karena hal ini semu tinggal bagaimana kita menanggulangi politik uang ini sehingga dapat membuat lancar jalannya demikrasi desa.

Dari hasil pengamatan peneliti kegiatan kampanye di Desa Sumberbrantas sangat disambut dengan antusias oleh warga, baik kegiatan kampanye dalam bentuk dengan mengikuti kegiatan tatap muka dan pemaparan visi & misi dan kegiatan debat publik calon kepala desa. Kegiatan tatap muka pemaparan visi & misi yang dilakukan yang langsung diadakan di Balai pertemuan warga Desa sangat ramai dihadiri oleh masyarakat baik orang tua ataupun anak muda. Dengan berbagai alasan mereka datang hanya untuk sekedar melihat-lihat atau memang ingin mengetahui visi & misi dari calon kepala desa disamping juga pelaksanaan pilkades juga baru pertama kali dilaksanakan di Desa Sumberbrantas, begitu juga dengan kegiatan debat publik calon kepala desa yang disiarkan langsung di televisi lokal Kota Batu juga sangat disambut dengan antusias oleh warga.

Partisipasi politik masyarakat dalam kampanye pemilihan Kepala Desa di Desa Sumberbrantas dapat dilihat dari tabel 4.10, yang menunjukkan masyarakat yang mengikuti kegiatan tatap muka dan pemaparan visi misi atas kesadaran sendiri sebanyak 143 responden dari 200 responden yang dipilih secara acak sedangkan masyarakat yang mengikuti kegiatan tatap muka dan pemaparan visi misi karena digerakan oleh calon kepala desa tidak ada. Masyarakat yang mengikuti kegiatan debat publik calon kepala desa atas kesadaran sendiri sebanyak 33 responden (16, 5%) sedangkan masyarakat yang mengikuti kegiatan debat publik calon kepala desa karena digerakan tim calon kepala desa tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan kampanye bersifat otonom (atas kesadaran sendiri).

Berdasarkan pengamatan peneliti mayoritas penduduk desa Sumberbrantas adalah petani, hal ini menyebabkan tingkat pendidikan mereka sebagian besar hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Dengan demikian tingkat pendidikan dan status sosial masyarakat tidak berpengaruh, ini dapat diketahui dari ketiga dusun yang berada di Desa Sumberbrantas memiliki tingkat pendidikan dan status sosial yang berbeda sehingga dapat membedakan akan tingkat kemakmuran masyarakat dusunnya dari 1 dusun dengan dusun yang lain sangat terlihat. Dengan demikian tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat Desa Sumberbrantas dalam kegiatan kampanye didorong oleh faktor kualitas calon kepala desa.

Faktor kualitas kepala desa sangat berpengaruh dikarenakan masyarakat desa baru pertama kali melaksanakan Pilkades dan juga ingin memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelum desa sumberbrantas bergabung dengan desa Tulungrejo, yang mana warga secara terbuka dihadapkan dengan bakal calon atau calon pemimipinnya. Berbeda dengan pilbup, pilgub, pilpres dan pileg. Pilkades tentu tidak identik dengan memilih kucing dalam karung. karena calon pemimpin yang akan dipilih adalah warga yang secara sosiologis mempunyai kedekatan tersendiri. Semua cela dan celah, baik dan buruk terlihat jelas. Hal ini dikarenakan Pilkades hanya memilih kepala desa dengan lingkup yang sangat sedikit

sehingga desa merupakan pemerintah paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam menentukan Partisipasi, sehingga tingkat partisipasi politik masyarakat desa dalam kampanye sangat tinggi dibandingkan dengan pilgub ataupun pilkada.

#### **b. Partisipasi dalam Pemungutan Suara**

Kegiatan pemungutan suara merupakan tahapan yang menentukan bagi seorang calon Kepala Desa, karena pada tahap ini merupakan hal yang menentukan jadi atau tidaknya seorang calon untuk diusulkan memangku jabatan sebagai kepala Desa sesuai dengan jumlah suara yang telah diperolehnya. Kegiatan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa di Desa Sumberbrantas berlangsung aman dan lancar tanpa. Hal ini dikarekan masyarakat desa sumberbrantas sudah menerima sosialisasi Pilkades pada jauh-jauh hari sehingga dapat menjamin kegiatan Pilkades secara aman dan lancar disamping masyarakat juga baru pertama kali diadakan Pilkades secara langsung.

Surat suara yang dianggap sah dalam pemilihan kepala desa Sumberbrantas adalah:

- a. Surat Suara dianggap sah apabila colosan tepat pada tanda gambar yang memuat foto, nomor urut peserta dan nama calon.
- b. Apabila terjadi / terdapat coblosan lebih dari satu yang notabene surat suara tidak dibuka lipatnya sehingga foto yang dicoblos tembus maka surat suara dianggap syah.
- c. Apabila terdapat lebih dari satu coblosan dalam satu kotak yang memuat foto, nomor urut peserta dan nama calon dianggap syah.

Sedangkan surat suara yang dianggap tidak sah dalam pemilihan kepala desa Sumberbrantas adalah:

- a. Apabila terjadi atau terdapat coblosan lebih dari dua coblosan akibat surat suara tidak dibuka lebar maka surat suara dianggap tidak syah.
- b. Apabila terjadi atau terdapat coblosan di luar garis yang memuat foto, nomor urut peserta dan nama calon dianggap tidak syah.



- c. Apabila terjadi atau terdapat coblosan yang tidak menggunakan alat coblos yang disediakan panitia misalnya rokok, disobek, dengan ballpoint / pensil maka surat suara dianggap tidak syah.
- d. Apabila terdapat coretan atau tulisan yang tidak dilakukan panitia surat suara dianggap tidak syah.

Kegiatan pemungutan suara yang diikuti masyarakat Desa Sumberbrantas berlangsung lancar. Partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara dapat dilihat dari tabel 4.13 dimana masyarakat yang hadir ke TPS dan mencoblos atas kesadaran sendiri sebanyak 183 responden dari 200 responden yang dipilih secara acak sedangkan masyarakat yang tidak hadir ke TPS sebanyak 17 responden dari 200 responden yang dipilih secara acak. Bagi masyarakat yang tidak hadir itu hanya dikarenakan karena mereka yang masih bersekolah dan ada yang masih bekerja di luar daerah.

Partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemungutan suara di Desa Sumberbrantas dapat dilihat dalam tabel 12 dimana masyarakat yang hadir di TPS 91, 5% hadir dan mencoblos karena kesadaran mereka sendiri dan tidak ada campur tangan para calon ataupun para Tim kampanye. Tingkat Partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara di Desa ini dapat dikatakan sangat baik dan bersifat otonom dan menunjukkan tingkat kesadaran politik masyarakat tinggi.

Berdasarkan pengamatan peneliti sebagian besar masyarakat desa sumberbrantas memiliki pendidikan yang rendah terbukti dengan banyaknya warga yang hanya tamatan Sekolah Dasar, hal ini dikarenakan pendapatan para buruh tani tidak mencukupi untuk biaya melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu tingkat pendidikan dan status sosial masyarakat tidak mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara, baik dengan pendidikan tinggi ataupun rendah, status sosial tinggi ataupun tidak punya seluruh masyarakat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pemungutan suara Pilkadaes periode 2008-2013.

Yang mendorong masyarakat dalam kegiatan pemungutan suara adalah faktor kualitas kepala desa (figur calon kepala desa dan program kerja) karena bahwa Pilkadaes masih pertama kali dilaksanakan di Desa

Sumberbrantas dan juga strategi yang dilakukan oleh calon kepala desa yang dilakukan untuk menarik simpati masyarakat sehingga mau memilih mereka. Dari kelima calon kepala desa memiliki strategi yang berbeda-beda setiap calon kepala desa, supaya mendapatkan simpati dari masyarakat. Hal ini semata-mata hanya digunakan untuk menarik simpati masyarakat supaya mau mendukung calon kepala desa, disamping itu juga salah satu masyarakat yang mendorong masyarakat sangat antusias adalah karena pada hari pencoblosan seluruh warga libur dari bekerja sehingga masyarakat mempunyai waktu istirahat setelah mencoblos. Karena masyarakat desa Sumberbrantas baru pertama kali mengadakan Pilkades secara langsung dan juga masyarakat Desa Sumberbrantas masih sangata polos sehingga gampang “anut ubyuk” akan keadaan sekitar.

### c. Partisipasi dalam Perhitungan Suara

Kegiatan perhitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia Panwas, pemantau dan warga masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perhitungan suara merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan pemilihan kepala desa. Kehadirannya mempunyai arti yang cukup penting bagi keberhasilan sahnya suara pemilih yang telah dipergunakan bagi setiap anggota masyarakat, sebab dengan kehadiran mereka dapat berperan sekaligus sebagai saksi bilaman aada sesuatu yang kurang sesuai dengan apa yang seharusnya dalam perhitungan suara.

Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik agar kegiatan perhitungan sura berjalan dengan jujur dan adil. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan perhitungan suara cukup memeriahkan suasana, sebab kebanyakan mereka yang mengikuti kegiatan ini ingin mengetahui hasil yang diperoleh dalam menentukan siapa yang berhak menjadi kepala desa dan mengingat hal ini merupakan kepala desa yang pertama.

Pelaksanaan rekapitulasi di laksanakan setelah ditutupnya TPS oleh KPPS dan setelah satu jam beristirahat kemudian dimulailah perhitungan suara. Sesuai dengan tata tertib Pilkades yakni sebagai berikut:

- a. Setelah pemunutan suara berakhir, Panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penhitungan suara;
- b. Saksi yang ditugaskan bakal calon harus mengisi biodata saksi yang disediakan oleh panitia;
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa Membuka kotak suara dan mencocokkan kesesuaian jumlah surat suara yang masuk dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, disaksikan oleh masing-masing saksi;
- d. Panitia Pemilihan Kepala Desa Membacakan surat suara yang dicoblos pemilih, disaksikan oleh masing-masing saksi, kemudian mencatatnya dipapan tulis/data score yang memuat hasil perolehan suara Pemilihan Kepala Desa;
- e. Calon yang berhak dipilih dan memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih dengan ketentuan sedikitnya 25 % ( dua puluh lima perseratus) dari pemilih yang hadir atau yang telah menggunakan hak pilihnya;
- f. Apabila calon yang berhak dipilih memperoleh suara terbanyak, tetapi kurang dari 25 % (dua puluh lima perseratus) sebagaimana disebut pada ayat (1), maka diadakan pemilihan ulang khusus untuk calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua;
- g. Apabila calon yang berhak dipilih memperoleh suara terbanyak dan sudah mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih, terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon dengan jumlah sama, maka diadakan pemilihan ulang;
- h. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan;
- i. Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) hasilnya masih sama, maka penetapannya diserahkan kepada Walikota dan para Calon yang terpilih;

Partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan perhitungan suara di Desa Sumberbrantas baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.13 bahwa



masyarakat yang mengikuti kegiatan perhitungan suara atas kemauan sendiri sebanyak 128 responden dari 200 responden sedangkan 72 responden tidak mengikuti kegiatan perhitungan suara dari 200 responden yang diambil secara acak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan perhitungan suara sangat tinggi dan bersifat otonom. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat Desa sangat tinggi, beberapa hal yang dapat mendorong tingkat partisipasi politik masyarakat adalah faktor kualitas kepala desa (figur calon kepala desa dan program kerja) ini karena rasa penasaran masyarakat akan keberhasilan pendukungnya dalam Pilkades dan juga hal ini baru pertama kali dilakukan di Desa Sumberbrantas sehingga masyarakat sangat antusias menyaksikan proses perhitungan suara yang dilakukan setelah ditutupnya Tempat Pemungutan Suara (TPS). Masyarakat dengan sabar menunggu di balai desa sampai perhitungan selesai dilakukan dan salah satu calon dinyatakan sebagai Kepala Desa di Desa Sumberbrantas dengan harapan ke depan Kepala Desa bisa demokratis, jujur dan adil.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mendorong Partisipasi Politik**

Faktor yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pilkades adalah faktor kualitas kepala desa (figur calon kepala desa dan program kerja), baik partisipasi dalam kegiatan kampanye, partisipasi dalam kegiatan pemungutan suara ataupun partisipasi dalam kegiatan perhitungan suara. Disamping hal ini dikarenakan baru pertama kali masyarakat desa sumberbrantas melaksanakan pemilihan kepala desa sehingga masyarakat menjadi sangat antusias dalam mengikuti kegiatan Pilkades dari awal sampai akhir, ini juga dikarenakan oleh masyarakat ingin memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelum desa sumberbrantas bergabung dengan desa Tulungrejo, yang mana warga secara terbuka dihadapkan dengan bakal calon atau calon pemimpinya. Berbeda dengan pilbup, pilgub, pilpres dan pileg. Pilkades tentu tidak identik dengan memilih kucing dalam karung. karena calon pemimpin yang akan dipilih adalah warga yang secara sosiologis mempunyai kedekatan tersendiri. Semua cela dan celah, baik dan buruk terlihat jelas. Hal ini dikarenakan Pilkades hanya memilih

kepala desa dengan lingkup yang sangat sedikit sehingga desa merupakan pemerintah paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam menentukan Partisipasi.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Partisipasi politik masyarakat merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Salah satu sarana partisipasi politik masyarakat dapat diwujudkan dalam proses pemilihan penguasa dan di negara demokrasi pada umumnya dilakukan melalui pemilihan umum, yang merupakan pemilihan umum rakyat yang secara langsung maupun tidak langsung memilih orang-orang yang akan memegang jabatan politis.

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar pada supra-struktur ketatanegaraan Indonesia yakni perubahan ketentuan pemilihan presiden dan wakil presiden dari system perwakilan menjadi pemilihan secara langsung. Bagi perkembangan politik local, perubahan juga merupakan peluang untuk mendorong pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal ini juga berakibat pada tingkat pemerintaha paling rendah yakni pemilihan kepala desa secara langsung.

Tahun 2008 bulan April tepatnya tanggal 17, pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sumberbrantas digelar pilkades periode 2008-2013 di 3 pedukuhan yakni Dusun Krajan, Dusun Lemah Putih dan Dusun Jurang Kual. Partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa terwujud dalam berbagai bentuk, diantaranya: kegiatan kampanye, kegiatan pemungutan suara, dan kegiatan perhitungan suara. Partisipasi politik masyarakat Desa Sumberbrantas dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dikatan tinggi. Hal tersebut dibuktikan bahwa Partisipasi Politik masyarakat dalam pemberian suara mencapai 90,1%.

Dari hasil penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa di Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu dapat diambil kesimpulan:

1. Bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa terwujud dalam berbagai bentuk, yaitu: kegiatan kampanye, kegiatan pemungutan suara, dan kegiatan perhitungan suara.



2. Tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Sumberbrantas dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan pada 200 responden bahwa Partisipasi Politik masyarakat dalam pemberian suara mencapai 91,5% dan selebihnya 8,5% tidak menggunakan hak pilihnya. Alasan responden tidak menggunakan hak pilihnya cukup rasional yaitu sebagian masih duduk dibangku SLTA dimana saat pilkades berlangsung pada hari efektif sehingga tidak dapat memberikan hak pilihnya dan sebagian lagi masih bekerja diluar daerah saat pilkades berlangsung.
3. Sifat partisipasi politik masyarakat desa sumberbrantas dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa lebih bersifat otonom atas kesadaran sendiri. Hal itu terlihat dalam kegiatan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara yang mana dari seluruh responden rata-rata 90% berpartisipasi atas kesadaran sendiri.
4. Faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat desa Sumberbrantas dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu: Faktor kualitas kepala desa sangat berpengaruh dikarenakan masyarakat desa baru pertama kali melaksanakan Pilkades, yang mana warga secara terbuka dihadapkan dengan bakal calon atau calon pemimpinnya. Berbeda dengan pilbup, pilgub, pilpres dan pileg. Pilkades tentu tidak identik dengan memilih kucing dalam karung. Karena calon pemimpin yang akan dipilih adalah warga yang secara sosiologis mempunyai kedekatan tersendiri. Semua cela dan celah, baik dan buruk terlihat jelas. Hal ini dikarenakan Pilkades hanya memilih kepala desa dengan lingkup yang sangat sedikit sehingga desa merupakan pemerintah paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam menentukan Partisipasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pemerintah Desa Sumberbrantas, khususnya dalam pelaksanaan pilkades dimasa yang akan datang. Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Jika pilkades mengarah pada tindakan persaingan yang tidak sehat, itu adalah bagian dari suatu dampak rendahnya tingkat kedewasaan politik masyarakat desa. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pemerintah Desa Sumberbrantas sebaiknya memberdayakan masyarakat desa melalui lembaga swadaya masyarakat atau LSM dengan bentuk memberikan pelatihan tentang pemahaman demokrasi yang baik, dengan tujuan untuk menumbuhkan kondisi dan situasi masyarakat yang dinamis, serta menghindari persaingan yang tidak sehat sebagai penyalahgunaan demokrasi.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**DAFTAR PUSTAKA****Buku-buku**

- Alfian. 1980. *Pemikiran dan perubahan politik*. Jakarta: Gramedia.
- Almond, Gabriel A dan Verba Sidney. 1986. *Budaya politik : Tingkah laku politik dan demokrasi di 5 negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Budiarjo, Miriam. 1985. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- . 1998. *Partisipasi politik dan partai politik*. Jakarta: Gramedia.
- Hasyim, Laila. 1980. *Jaring-jaring Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru
- Huntington, P Samuel dan Nelson, Joan. 1990. *Partisipasi Politik dinegara berkembang*, terjemahan dari buku *no easy choice*. Jakarta: Gramedia.
- Ismani HP dan Suryadi. 1991. *Metode Penelitian*. Malang: BPP FIA Unibraw.
- Ismawan, Indra. 1999. *Money politics: Pengaruh Uang dalam Pemilihan Umum*. Yogyakarta: media Pressindo
- Kantaprawira, Rusadi. 1992. *Sistem politik indonesia*. Bandung : sinar baru algensindo
- Mas' oed, Mochtar dan Andrew, Collin Mac. 1982. *Perbandingan sistem politik*. Yogyakarta: Gajahmada University pers.
- Moleong, lexy J. 2002. *Metodologi penelitian kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahman, A.H.I., 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rifai, Amzulian. 2003. *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepla Daerah*. Jakarta: ghalia Indonesia
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Pembangunan masyarakat, mempersiapkan masyarakat tinggal landas*, Jakarta: Bina aksara.

**Undang-undang**

- Undang-undang No.22. 1999. "UU Pemerintah Daerah No.22 Tahun 1999", diakses pada tanggal 5 September 2008 dari [http://www.pu.go.id/ditjen\\_ruang/nspm/UU\\_22-99\\_Pemda.htm](http://www.pu.go.id/ditjen_ruang/nspm/UU_22-99_Pemda.htm).



Peraturan Pemerintah No.72. 2005. “PP Desa No.72 tahun 2005”, diakses pada tanggal 5 September 2008 dari [http://www.pu.go.id/ditjen\\_ruang/nspm/PP\\_72-05\\_Pemda.htm](http://www.pu.go.id/ditjen_ruang/nspm/PP_72-05_Pemda.htm).

Undang-undang No.32 2004. “UU pemerintah daerah No. 32 tahun 2004”, diakses tanggal 5 September 2008 dari <http://storage.wartaegov.com/Regulasi/UU%20RI%20No.%2032%20Th%202004.pdf>.

Undang-undang No. 5. 1979. “UU Pemerintah desa No.5 tahun 1979” diakses tanggal 3 oktober 2008 dari <http://www.theceli.com/dokumen/produk/1979/UU5-1979.htm>.

Undang-undang No.12.2003. “UU tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD No.12 tahun 2003” diakses tanggal 27 november 2008 dari <http://www.tempointeratif.com>

#### **Internet**

Gito. 2008. “Asas Pemilu tahun 2004”. Diakses tanggal 2 oktober 2008 dari <http://gito.smansarembang.ict08.www.smansarbg.com>

Mawardi, Irvan. 2008. “Partisipasi dan Pemilu”, diakses tanggal 2 oktober 2008 dari <http://irvanogie.wordpress.com/2008/11/04/mahalnya-partisipasi-politik/>.

Masrur, Masad M. 2008. “Pengertian Demokrasi”, diakses tanggal 2 oktober 2008 dari <http://masadmasrur.blog.co.uk/2008/03/20/pengertian-demokrasi->

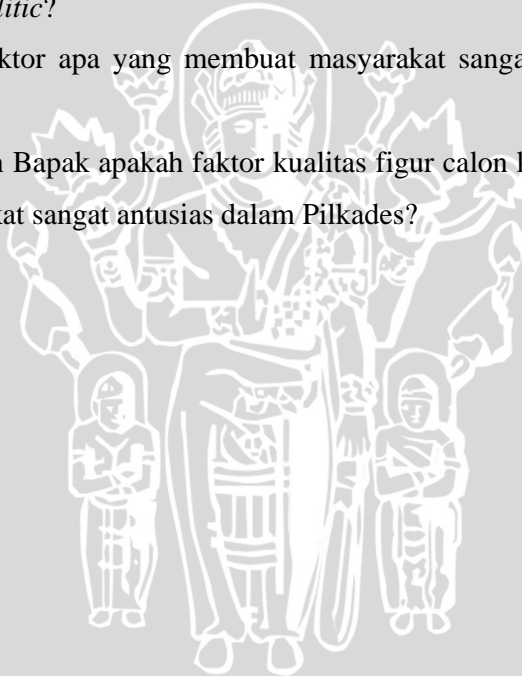
Silaban, saut P. 2005. “Partisipasi”, diakses tanggal 31 Mei 2008 dari <http://www.silaban.net/2005/10/16/partisipasi/>

Tim penyusun. 2008. “Pilkades”, diakses tanggal 31 Mei 2008 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Pilkades>

Widodo, Tri Utomo, 2000. “Sisitem Politik Indonesi: sebuah pengantar”, diakses tanggal 2 Oktober 2008 dari [http://www.geocities.com/mas\\_tri/pipolin.pdf](http://www.geocities.com/mas_tri/pipolin.pdf)

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai antusias kehadiran masyarakat dalam pemilihan kepala desa?
2. Bagaimana menurut Bapak tentang kegiatan kampanye yang dilakukan para calon kepala desa?
3. Menurut tanggapan Bapak mengenai pemungutan suara yang dilakukan waktu Pilkades?
4. Menurut tanggapan Bapak bagaimana mengenai perhitungan suara dan pa kendala-kendala yang ada?
5. Menurut tanggapan Bapak mengenai pernyataan “Pilkades merupakan ajang judi dan *Money Politic*?
6. Menurut Bapak faktor apa yang membuat masyarakat sangat antusias dalam Pilkades?
7. Menurut tanggapan Bapak apakah faktor kualitas figur calon kepala Desa yang membuat masyarakat sangat antusias dalam Pilkades?



# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

